



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 73 TAHUN 2017

TENTANG

PENYESUAIAN TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta untuk meningkatkan sinergi antara prioritas dan sasaran perencanaan tahunan tahun 2019-2021 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, dalam hal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perubahan capaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016-2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan semua unsur masyarakat dalam rangka mencapai visi dan misi Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
12. Kebijakan adalah arah tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 2

Menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 29 Desember 2017
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 29 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 73 TAHUN 2017
TENTANG
PENYESUAIAN TERHADAP PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN 2016-2021

BAB I
PENYESUAIAN TERHADAP
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja daerah. Perencanaan yang komprehensif disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat. Salah satu poin penting dalam aktivitas tersebut adalah upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga pembangunan daerah yang merata ke seluruh masyarakat dapat terwujud.

Penentuan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan, memerlukan analisis lingkungan yang mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri atas kekuatan dan kelemahan. Sedangkan faktor lingkungan eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Analisis ini diperlukan sebagai media untuk memastikan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan melalui penetapan tujuan (*goal*) dan sasaran (*objective*) pembangunan daerah yang ingin dicapai serta strateginya dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Proses identifikasi analisis lingkungan ini menggunakan metode analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threats*) dengan melibatkan seluruh komponen Pemerintah Daerah, masukan masyarakat yang dihimpun dalam dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah tahun 2010-2015, serta dokumen perencanaan lainnya yang mendukung.

A. Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threats*)

Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threats*) dilakukan untuk mengidentifikasi potensi positif dan negatif dari internal organisasi pemerintah. Identifikasi ini dimaksudkan agar Pemerintah Daerah dapat memaksimalkan potensi dirinya dalam upaya mencapai visi dan misi. Identifikasi tersebut terdiri dari unsur

kekuatan dan kelemahan organisasi. Adapun hasil identifikasi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Kekuatan

Kekuatan Kabupaten Kebumen yang teridentifikasi antara lain:

- a. jumlah penduduk yang besar dengan komposisi penduduk usia produktif yang lebih tinggi;
- b. kehidupan dan budaya masyarakat yang religius dan agamis;
- c. adanya keinginan masyarakat untuk bangkit dari kemiskinan dan ketertinggalan;
- d. masih tumbuh suburnya jiwa gotong royong, kebersamaan dan kerukunan antar warga masyarakat;
- e. kondisi geografis wilayah dengan variasi topografi pegunungan dan pantai yang memiliki pesona alam yang indah;
- f. sumber daya alam yang cukup melimpah dan beragam (pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan, pertambangan, dan lain sebagainya);
- g. pembangunan jalan lintas selatan jawa sebagai akses horizontal bagian selatan;
- h. tersedianya aparatur yang mempunyai komitmen yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi;
- i. adanya kelembagaan yang sesuai dengan bidang kewenangan; dan
- j. adanya program pendidikan dan pelatihan bagi aparatur.

2. Kelemahan

Kelemahan Kabupaten Kebumen dalam pembangunan 5 (lima) tahun mendatang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. tingginya angka kemiskinan dan pengangguran pada usia produktif;
- b. kondisi geografis wilayah yang rawan bencana alam;
- c. belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah;
- d. belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan dasar;
- e. belum optimalnya pendapatan dan kemampuan keuangan daerah;
- f. belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- g. belum optimalnya penguasaan dan aplikasi sistem dan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan masyarakat; dan
- h. masih rendahnya pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pengelolaan sumber daya.

3. Peluang

Peluang untuk pembangunan Kabupaten Kebumen 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

- a. terbukanya peluang usaha dan investasi, khususnya pada sektor agribisnis, agroindustri, pariwisata, kelautan serta energi dan sumber daya mineral;
 - b. terbukanya informasi pasar baik lokal, regional maupun global yang didukung oleh perkembangan informasi dan teknologi;
 - c. pemberlakuan otonomi daerah yang semakin luas bagi Pemerintah Daerah;
 - d. iklim demokratis yang semakin membaik, serta perhatian pemerintah pusat terhadap Pemerintah Daerah yang semakin tinggi;
 - e. mulai tumbuhnya kesadaran kehidupan berpolitik masyarakat, dan terbukanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui otonomi daerah;
 - f. kebijakan pemerintah pusat dalam pemberian modal bagi pengembangan usaha kecil dan menengah termasuk petani dan nelayan;
 - g. perubahan kebijakan pemerintah pusat dalam pengelolaan dan bagi hasil pemanfaatan sumber daya alam; dan
 - h. adanya bantuan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Provinsi.
4. Ancaman

Adapun ancaman yang mungkin muncul dalam pembangunan Kabupaten Kebumen 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- a. dinamisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat yang sering mengalami perubahan;
- b. kondisi ekonomi makro yang masih belum stabil;
- c. pengembangan kawasan Ekonomi Asia;
- d. dampak negatif arus informasi dan globalisasi yang semakin cepat;
- e. terjadinya degradasi moral masyarakat; dan
- f. pengembangan wilayah sekitar yang memiliki karakteristik sama.

B. Strategi

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menciptakan nilai tambah (*value added*) dari hasil perencanaan pembangunan untuk digunakan oleh pemangku kepentingan di Kabupaten Kebumen. Di lain pihak, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam sasaran RPJMD. Rumusan strategi dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 yang dilaksanakan melalui 6 (enam) misi dan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut:

1. Strategi Misi Ke-1: Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas

Rangkaian strategi dari misi ini, diarahkan untuk mewujudkan dan menciptakan sumber daya manusia di Kabupaten Kebumen yang berkualitas dan berdaya saing. Sasaran dan strategi untuk pencapaian misi ke-1 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1
Sasaran dan Strategi untuk Misi Ke-1

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
1.	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	1.1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1.1.1	Meningkatkan mutu pendidikan formal (terutama jenjang PAUD dan DIKDAS) dan pendidikan non formal
				1.1.2	Meningkatkan akses dana bantuan pendidikan bagi masyarakat
		1.2	Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan	1.2.1	Mempermudah akses dalam memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas
		1.3	Meningkatnya prestasi dan pembinaan pemuda dan olahraga	1.3.1	Meningkatkan mutu/ kualitas pembinaan pemuda, olahraga dan prasarana olahraga
		1.4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.4.1	Meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat terutama untuk masyarakat kurang mampu dan berisiko tinggi terhadap kesehatan
				1.4.2	Meningkatkan kualitas SDM kesehatan
				1.4.3	Meningkatkan upaya penanggulangan penyakit
				1.4.4	Meningkatkan perilaku hidup sehat
				1.4.5	Perluasan akses dan peningkatan pelayanan pada ibu selama kehamilan dan pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar.

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
				1.4.6	Perluasan akses dan peningkatan pelayanan pada bayi pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar.

Sumber : Data primer diolah

Hasil penerapan dari strategi pada misi ke-1 yang dominan pada bidang pendidikan dan kesehatan, diharapkan dapat meningkatkan besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 2016-2021.

2. Strategi Misi Ke-2: Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat.

Rangkaian strategi dari misi ke-2 ini diarahkan untuk menciptakan masyarakat di Kabupaten Kebumen yang tenteram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum, serta peningkatan akhlak masyarakat secara keseluruhan. Sasaran dan strategi untuk pencapaian misi ke-2, secara lengkap adalah sebagai berikut:

Tabel 6.2
Sasaran dan Strategi untuk Misi Ke-2

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
1.	Menciptakan masyarakat yang agamis dan berakhlak mulia	1.1	Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berakhlak mulia	1.1.1	Meningkatkan pemahaman pengamalan agama
				1.1.2	Meningkatkan pembinaan dan penanganan terhadap masyarakat yang rawan kasus asusila dan norma sosial keagamaan lainnya
2.	Menciptakan masyarakat yang tenteram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum	2.1	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	2.1.1	Meningkatkan kordinasi antar berbagai pihak untuk meminimalisir pelanggaran hukum, kasus bencana dan meningkatkan kemudahan bagi masyarakat untuk berdisiplin, berpolitik dan

					berbudaya
--	--	--	--	--	-----------

Sumber : Data primer diolah

Hasil penerapan dari strategi pada misi ke-2 yang dominan pada bidang sosial dan budaya, diharapkan dapat meningkatkan Indeks Ketenteraman Sosial (IKS) yang diindikasikan dengan semakin menurunnya persentase pelanggaran hukum dan juga semakin meningkatnya persentase ketersediaan prasarana keagamaan di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu tahun 2016-2021.

3. Strategi Misi Ke-3: Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan.

Rangkaian strategi pendukung misi ke-3, diarahkan untuk mewujudkan beberapa tujuan, yaitu: (i) meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang merata berbasis ekonomi kerakyatan; (ii) meningkatkan daya saing investasi dan pariwisata daerah, (iii) mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap; serta (iv) terwujudnya pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya pesisir berdasarkan asas konservasi, efisien dan lestari. Sasaran dan strategi untuk pencapaian misi ke-3, secara lengkap adalah sebagai berikut:

Tabel 6.3
Sasaran dan Strategi untuk Misi Ke-3

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang merata berbasis ekonomi kerakyatan	1.1	Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	1.1.1	Meningkatkan hasil produksi sektor pertanian, peternakan, perikanan, kelautan dan perkebunan
				1.1.2	Mengembangkan kawasan perdesaan
				1.1.3	Mengembangkan Kawasan Industri
				1.1.4	Meningkatkan kualitas SDM koperasi
				1.1.5	Memperluas akses permodalan dan pemasaran produk dan jasa koperasi

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
				1.1.6	Penganekaragaman ketahanan pangan berbasis potensi lokal
				1.1.7	Peningkatan operasi pasar
				1.1.8	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan perdagangan dalam negeri dalam usaha meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha dan masyarakat yang terlibat
				1.1.9	Meningkatkan kualitas SDM industri kecil dan menengah
				1.1.10	Meningkatkan akses permodalan dan pemasaran hasil produksi industri kecil dan menengah
				1.1.11	Mengembangkan unit usaha syariah pada BUMD
2.	Meningkatkan Daya Saing Investasi dan Pariwisata Daerah	2.1	Meningkatnya daya saing investasi daerah	2.1.1	Mengembangkan sistem informasi investasi daerah dan perizinan terpadu satu pintu
		2.2	Meningkatnya kunjungan wisatawan	2.2.1	Meningkatkan upaya penggalan dan promosi/daya tarik wisata
3.	Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap	3.1	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	3.1.1	Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan
				3.1.2	Meningkatkan kualitas jaringan irigasi
				3.1.3	Meningkatkan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi
				3.1.4	Meningkatkan fasilitas dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (LLAJ)
				3.1.5	Meningkatkan aksesibilitas komunikasi, informasi, dan media massa
				3.1.6	Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana bidang keciptakaryaan
				3.1.7	Meningkatkan pelayanan air bersih dan pengelolaan air limbah serta

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
					pengelolaan dan konservasi SDA
				3.1.8	Meningkatkan ketertiban administrasi pertanahan secara elektronik
				3.1.9	Meningkatkan jaringan listrik perdesaan
4.	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya pesisir berdasarkan asas konservasi, efisien dan lestari	4.1	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	4.1.1	Menurunkan tingkat perusakan lingkungan hidup termasuk pencemaran udara, air, dan tanah
5.	Mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja dan penurunan angka pengangguran	5.1	Menurunnya angka pengangguran	5.1.1	Meningkatkan keterampilan masyarakat
				5.1.2	Meningkatkan penyediaan lapangan kerja serta jiwa kewirausahaan bagi masyarakat

Sumber : Data primer diolah

Hasil penerapan dari strategi pada misi ke-3 yang dominan pada bidang pengembangan infrastuktur wilayah, diharapkan dapat dijadikan sarana untuk menunjang dan menjadi pendorong dalam peningkatan angka pertumbuhan ekonomi, meningkatnya nilai Indeks Daya Saing Usaha, peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur wilayah, menurunkan angka pengangguran yang bernilai ekonomi serta terjadinya peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 2016-2021.

4. Strategi Misi Ke-4: Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.

Rangkaian strategi pendukung misi ke-4, diarahkan untuk mewujudkan beberapa tujuan, yaitu: (i) untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya dan sejahtera; (ii) untuk mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja dan penurunan angka pengangguran; (iii) untuk mewujudkan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya daerah. Sasaran dan strategi untuk pencapaian misi ke-4, secara lengkap adalah sebagai berikut:

Tabel 6.4
Sasaran dan Strategi untuk Misi Ke-4

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
1.	Mewujudkan masyarakat yang berdaya dan sejahtera	1.1	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	1.1.1	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan

Sumber : Data primer diolah

Hasil penerapan dari strategi pada misi ke-4 yang dominan pada bidang ekonomi diharapkan dapat dijadikan sarana untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu tahun 2016-2021.

5. Strategi Misi Ke-5: Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Rangkaian strategi pendukung misi ke-5, diarahkan untuk mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu tahun 2016-2021. Sasaran dan strategi untuk pencapaian misi ke-5, secara lengkap adalah sebagai berikut:

Tabel 6.5
Sasaran dan Strategi untuk Misi Ke-5

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
1.	Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	1.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1.1.1	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan ruang kelas
				1.1.2	Meningkatkan kualitas sarana pendukung pendidikan
		1.2	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan	1.2.1	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan PKD, puskesmas dan rumah sakit

Sumber : Data primer diolah

Hasil penerapan dari strategi pada misi ke-5 yang dominan pada penyediaan sarana pendukung bidang pendidikan dan kesehatan, diharapkan dapat meningkatkan besaran indeks keterjangkauan pendidikan dan indeks keterjangkauan kesehatan di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu tahun 2016-2021.

6. Strategi Misi Ke-6: Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan

publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

Rangkaian strategi pendukung misi ke-6 diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu tahun 2016-2021. Sasaran dan strategi untuk pencapaian misi ke-6, secara lengkap adalah sebagai berikut:

Tabel 6.6
Sasaran dan Strategi untuk Misi Ke-6

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
1.	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif	1.1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	1.1.1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, lembaga perwakilan rakyat daerah dan kualitas pelayanan administrasi perkantoran serta kapasitas keuangan daerah
				1.1.2	Meningkatkan prosedur pelaporan sistem keuangan yang berbasis akrual dan sistem monitoring - evaluasi (monev) hasil pembangunan yang semakin baik
		1.2	Meningkatnya penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kinerja aparatur dan lembaga daerah	1.2.1	Meningkatkan peran aparatur dan lembaga pemerintah dalam penerapan pengamalan nilai-nilai dan fasilitasi kegiatan keagamaan

Sumber : Data primer diolah

Sasaran dari strategi pada misi ke-6 yang dominan pada bidang pemerintahan ini ditujukan untuk meningkatkan indeks penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (Indeks Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

C. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk

menentukan tahapan dan prioritas pembangunan 5 (lima) tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan 5 (lima) tahunan dalam RPJMD.

Penetapan tema atau fokus tahunan tidak berarti mengabaikan kondisi lain yang memang harus dikerjakan terus menerus setiap tahun. Alokasi program rutin dan penyelenggaraan layanan publik terus menerus ada dan dialokasikan anggarannya. Hal ini didasari pada prinsip perencanaan strategik teknokratis. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan secara baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua: (1) Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah; (2) Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Tema tahapan pembangunan di Kabupaten Kebumen selama Tahun 2016-2021 dapat digambarkan dalam Gambar 6.1.berikut:



Gambar 6.1
Tema Pembangunan Tahunan
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

Sumber : Data primer diolah

Secara keseluruhan arah kebijakan berdasarkan fokus tema pembangunan dijabarkan keterkaitan strategi dan arah kebijakan diuraikan dalam Tabel 6.7 sebagai berikut.

Tabel 6.7.
Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 1: Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh	

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas			
1	Meningkatkan mutu pendidikan formal (terutama jenjang PAUD dan DIKDAS) dan pendidikan non formal	a	Peningkatan mutu pendidikan formal dan non formal.
2	Meningkatkan akses dana bantuan pendidikan bagi masyarakat	b	Perluasan akses pendidikan formal
3	Mempermudah akses dalam memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas	c	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam meraih pendidikan yang semakin berkualitas
4	Peningkatan kualitas dan kuantitas pembinaan olah raga dan prasarana olah raga.	d	Meningkatkan mutu/kualitas pembinaan olahraga dan prasarana olahraga
5	Meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat terutama untuk masyarakat kurang mampu dan berisiko tinggi terhadap kesehatan	e	Peningkatan akses kesehatan, serta kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan;
6	Meningkatkan kualitas SDM kesehatan		
7	Meningkatkan upaya penanggulangan penyakit		
8	Meningkatkan perilaku hidup sehat	f	Peningkatan perilaku hidup sehat masyarakat
9	Perluasan akses dan peningkatan pelayanan pada ibu selama kehamilan dan pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar.	g	Meningkatkan akses dan pelayanan pada ibu selama kehamilan dan pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar
10	Perluasan akses dan peningkatan pelayanan pada bayi pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar.	h	Meningkatkan akses dan pelayanan pada bayi pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar
<p>Misi 2: Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat</p>			
1	Meningkatkan pemahaman pengamalan agama	a	Penguatan implementasi kesalehan sosial dan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan nilai-nilai ajaran agama
2	Meningkatkan pembinaan dan penanganan terhadap masyarakat yang rawan kasus asusila dan norma sosial keagamaan lainnya	b	Peningkatan peran pemerintah dalam kegiatan keagamaan dan toleransi beragama
3	Meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak untuk meminimalisir pelanggaran hukum, kasus bencana dan meningkatkan kemudahan bagi masyarakat untuk berdisiplin, berpolitik dan berbudaya	c	Optimalisasi produk hukum dan implementasinya di lapangan dalam mengatasi berbagai peristiwa/ kejadian di Kabupaten Kebumen

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
Misi 3: Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan			
1	Meningkatkan hasil produksi sektor pertanian, peternakan, perikanan, kelautan dan perkebunan	a	Peningkatan produktivitas sektor pertanian, peternakan, perikanan, kelautan dan perkebunan
2	Mengembangkan kawasan perdesaan	b	Pembangunan wilayah berbasis kawasan dan potensi daerah
3	Mengembangkan Kawasan Industri		
4	Meningkatkan kualitas SDM koperasi	c	Peningkatan peran koperasi sebagai lembaga intermediasi keuangan untuk kesejahteraan anggota
5	Memperluas akses permodalan dan pemasaran produk dan jasa koperasi		
6	Penganekaragaman ketahanan pangan berbasis potensi lokal	d	Optimalisasi ketahanan pangan yang berbasis potensi lokal
7	Peningkatan operasi pasar	e	Pengendalian inflasi sehingga tercipta stabilitas harga barang dan jasa yang tidak merugikan masyarakat
8	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan perdagangan dalam negeri dalam usaha meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha dan masyarakat yang terlibat	f	Peningkatan efisiensi kegiatan perdagangan dalam negeri
9	Meningkatkan kualitas SDM industri kecil dan menengah	g	Peningkatan produktivitas dan efisiensi industri kecil dan menengah.
10	Meningkatkan akses permodalan dan pemasaran hasil produksi industri kecil dan menengah		
11	Mengembangkan unit usaha syariah pada BUMD	h	Peningkatan kegiatan ekonomi berbasis syariah
12	Mengembangkan sistem informasi investasi daerah dan perizinan terpadu satu pintu	i	Peningkatan kemudahan iklim investasi di daerah.
13	Meningkatkan upaya penggalian dan promosi/pemasaran obyek-obyek wisata	j	Pengembangan pariwisata berbasis potensi alam dan non alam, dan berbasis komunitas/masyarakat
14	Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan	i	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur wilayah
15	Meningkatkan kualitas jaringan irigasi		
16	Meningkatkan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi		
17	Meningkatkan fasilitas dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (LLAJ)	j	Optimalisasi dan peningkatan kualitas sarana-prasarana transportasi dan komunikasi untuk menunjang dan memperlancar proses pembangunan daerah
18	Meningkatkan aksesibilitas komunikasi, informasi, dan media massa		
19	Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana bidang keciptakaryaan	k	Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana cipta karya
20	Meningkatkan pelayanan air bersih dan pengelolaan air limbah serta pengelolaan dan konservasi SDA	l	Peningkatan pelayanan air minum, pengelolaan sanitasi, dan pengelolaan SDA

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
21	Meningkatkan ketertiban administrasi pertanahan secara elektronik	m	Peningkatan dan optimalitas ketertiban administrasi pertanahan secara baik
22	Meningkatkan jaringan listrik perdesaan	n	Peningkatan pelayanan bidang ketenagalistrikan
23	Menurunkan tingkat perusakan lingkungan hidup termasuk pencemaran udara, air, dan tanah	o	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
<p>Misi 4: Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan</p>			
1	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan	a	Penurunan penduduk miskin di Kabupaten Kebumen
2	Meningkatkan keterampilan masyarakat	b	Peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat sesuai kebutuhan dunia kerja, khususnya dalam menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
3	Meningkatkan penyediaan lapangan kerja serta jiwa kewirausahaan bagi masyarakat		
<p>Misi 5: Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat</p>			
1	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan ruang kelas	a	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
2	Meningkatkan kualitas sarana pendukung pendidikan		
3	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan PKD, puskesmas dan rumah sakit	b	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana bidang kesehatan
<p>Misi 6: Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (<i>Good and Clean Government</i>) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama</p>			
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, lembaga perwakilan daerah dan kualitas pelayanan administrasi perkantoran serta kapasitas keuangan daerah	a	Optimalisasi kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah menuju terwujudnya Tata Pemerintahan yang Bersih dan Baik (<i>Good and Clean Governance</i>)

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
2	Meningkatkan prosedur pelaporan sistem keuangan yang berbasis akrual dan sistem monitoring - evaluasi (monev) hasil pembangunan yang semakin baik	b	Peningkatan akuntabilitas sistem pelaporan keuangan dan kinerja pembangunan menuju predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berkesinambungan
3	Meningkatkan peran aparatur dan lembaga pemerintah dalam penerapan pengamalan nilai-nilai dan fasilitasi kegiatan keagamaan	c	Peningkatan peran aparatur dan lembaga daerah dalam penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan

Sumber : Data primer diolah

Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD, secara lebih lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6.8
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Misi 1 : Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas					
1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	1.1 Meningkatnya IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	1.1.1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1 Meningkatkan mutu pendidikan formal (terutama jenjang PAUD dan DIKDAS) dan pendidikan non formal	a Peningkatan mutu pendidikan formal dan non formal.
		1.1.2	Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan	2 Meningkatkan akses dana bantuan pendidikan bagi masyarakat	b Perluasan akses pendidikan formal
				3 Mempermudah akses dalam memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas	c Peningkatan partisipasi masyarakat dalam meraih pendidikan yang semakin berkualitas
		1.1.3	Meningkatnya prestasi dan pembinaan pemuda dan olahraga	4 Meningkatkan mutu/ kualitas pembinaan pemuda, olahraga dan prasarana olahraga	d Peningkatan kualitas dan kuantitas pembinaan pemuda, olah raga dan prasarana olah raga

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
				1.1.4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5	Meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat terutama untuk masyarakat kurang mampu dan berisiko tinggi terhadap kesehatan	e	Peningkatan akses kesehatan, serta kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan
						6	Meningkatkan kualitas SDM kesehatan		
						7	Meningkatkan upaya penanggulangan penyakit		
						8	Meningkatkan perilaku hidup sehat	f	Peningkatan perilaku hidup sehat masyarakat
						9	Perluasan akses dan peningkatan pelayanan pada Ibu selama kehamilan dan pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar.	g	Peningkatan akses dan pelayanan pada Ibu selama kehamilan dan pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar
						10	Perluasan akses dan peningkatan pelayanan pada bayi pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar.	h	Peningkatan akses dan pelayanan pada bayi pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar

Misi 2: Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1.	Menciptakan masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	1.1	Meningkatnya Indeks Keberagamaan / diukur dengan = ((Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan) + (Persentase Prasarana Keagamaan dalam Kondisi baik)) / 2	1.1.1	Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	1	Meningkatkan pemahaman pengamalan agama	a	Penguatan implementasi kesalehan sosial dan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan nilai-nilai ajaran agama
						2	Meningkatkan Pembinaan dan penanganan terhadap masyarakat yang rawan kasus asusila dan norma sosial keagamaan lainnya	b	Peningkatan peran pemerintah dalam kegiatan keagamaan dan toleransi beragama
2.	Menciptakan masyarakat yang tenteram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum	2.1	Meningkatnya Indeks Ketenteraman Sosial (Persentase penurunan pelanggaran hukum)	2.1.1	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	3	Meningkatkan Koordinasi antar berbagai pihak untuk meminimalisir pelanggaran hukum, kasus bencana dan meningkatkan kemudahan bagi masyarakat untuk berdisiplin, berpolitik dan berbudaya	c	Optimalisasi produk hukum dan implementasinya di lapangan dalam mengatasi berbagai peristiwa/ kejadian di Kabupaten Kebumen
<p><u>Misi 3:</u> Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan</p>									
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang merata berbasis ekonomi kerakyatan	1.1	Meningkatnya Angka Pertumbuhan ekonomi	1.1.1	Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	1	Meningkatkan hasil produksi sektor pertanian, peternakan, perikanan, kelautan dan perkebunan	a	Peningkatan produktivitas sektor pertanian, peternakan, perikanan, kelautan dan perkebunan
						2	Mengembangkan kawasan perdesaan	b	Pembangunan wilayah berbasis kawasan dan potensi daerah
						3	Mengembangkan Kawasan Industri		

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
						4	Meningkatkan kualitas SDM koperasi	c	Peningkatan peran koperasi sebagai lembaga intermediasi keuangan untuk kesejahteraan anggota.
						5	Memperluas akses permodalan dan pemasaran produk dan jasa koperasi		
						6	Penganekaragaman ketahanan pangan berbasis potensi lokal	d	Optimalisasi ketahanan pangan yang berbasis potensi lokal
						7	Peningkatan operasi pasar	e	Pengendalian inflasi sehingga tercipta stabilitas harga barang dan jasa yang tidak merugikan masyarakat
						8	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan perdagangan dalam negeri dalam usaha meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha dan masyarakat yang terlibat		
						9	Meningkatkan kualitas SDM industri kecil dan menengah		
						10	Meningkatkan akses permodalan dan pemasaran hasil produksi industri kecil dan menengah		
						11	Mengembangkan unit usaha syariah pada BUMD		
2.	Meningkatkan Daya Saing Investasi dan Pariwisata Daerah	2.1	Meningkatnya Nilai Indeks Daya Saing Usaha	2.1.1	Meningkatnya daya saing investasi daerah	12	Mengembangkan sistem informasi investasi daerah dan perizinan terpadu satu	i	Peningkatan kemudahan iklim investasi di daerah.

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
							pintu		
				2.1.2	Meningkatnya kunjungan wisatawan	13	Meningkatkan upaya penggalian dan promosi/pemasaran obyek-obyek wisata	j	Pengembangan pariwisata berbasis potensi alam dan non alam, dan berbasis komunitas/masyarakat
3.	Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap	3.1	Persentase peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur wilayah	3.1.1	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	14	Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan	i	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur wilayah
						15	Meningkatkan kualitas jaringan irigasi		
						16	Meningkatkan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi		
						17	Meningkatkan fasilitas dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (LLAJ)	j	Optimalisasi dan peningkatan kualitas sarana - prasarana transportasi dan komunikasi untuk menunjang dan memperlancar proses pembangunan daerah
						18	Meningkatkan aksesibilitas komunikasi, informasi, dan media massa		
						19	Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana bidang keciptakarya	k	Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana cipta karya
						20	Meningkatkan pelayanan air bersih dan pengelolaan air limbah serta pengelolaan dan konservasi SDA	l	Peningkatan pelayanan air minum, pengelolaan sanitasi, dan pengelolaan SDA
						21	Meningkatkan ketertiban administrasi pertanahan secara elektronik	m	Peningkatan dan optimalitas ketertiban administrasi pertanahan secara baik

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
						22	Meningkatkan jaringan listrik perdesaan	n	Peningkatan pelayanan bidang ketenagalistrikan
4.	Mewujudkan pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya pesisir berdasarkan azas konservasi, efisien dan lestari	4.1	Indeks Kualitas Lingkungan	4.1.1	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	23	Menurunkan tingkat perusakan lingkungan hidup termasuk pencemaran udara, air, dan tanah	o	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
<p>Misi 4: Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan</p>									
1.	Mewujudkan masyarakat yang berdaya dan sejahtera	1.1	Menurunnya Angka Kemiskinan	1.1.1	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	1	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan	a	Penurunan penduduk miskin di Kabupaten Kebumen
2.	Mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja dan penurunan angka pengangguran	2.1	Menurunnya Angka Pengangguran	2.1.1	Meningkatnya keterserapan tenaga kerja	2	Meningkatkan keterampilan masyarakat	b	Peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat sesuai kebutuhan dunia kerja, khususnya dalam menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
						3	Meningkatkan penyediaan lapangan kerja serta jiwa kewirausahaan bagi masyarakat		
<p>Misi 5: Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat</p>									
1.	Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan	1.1	Indeks Keterjangkauan Pendidikan	1.1.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana	1	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan ruang kelas	a	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
	dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau				pendidikan	2	Meningkatkan kualitas sarana pendukung pendidikan		pendidikan
		1.2	Indeks Keterjangkauan Kesehatan	1.2.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan	3	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan PKD, puskesmas dan rumah sakit	b	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana bidang kesehatan
<p>Misi 6: Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (<i>Good and Clean Government</i>) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama</p>									
1.	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif	1.1	Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah / (Indeks Tata Kelola Pemerintahan yang Baik)	1.1.1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, lembaga perwakilan daerah dan kualitas pelayanan administrasi Perkantoran serta kapasitas keuangan daerah	a	Optimalisasi kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah menuju terwujudnya Tata Pemerintahan yang Bersih dan Baik (<i>Good and Clean Governance</i>)
						2	Meningkatkan prosedur pelaporan sistem keuangan yang berbasis akrual dan sistem monitoring - evaluasi (monev) hasil pembangunan yang semakin baik	b	Peningkatan akuntabilitas sistem pelaporan keuangan dan kinerja pembangunan menuju predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berkesinambungan

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
				1.1.2	Meningkatnya penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kinerja aparatur dan lembaga daerah	3	Meningkatkan peran aparatur dan lembaga pemerintah dalam penerapan pengamalan nilai-nilai dan fasilitasi kegiatan keagamaan	c	Peningkatan peran aparatur dan lembaga daerah dalam penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan

Sumber : Data primer diolah

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah selanjutnya diuraikan dan dijabarkan ke dalam arah kebijakan pembangunan tahunan. Arah kebijakan pembangunan tahunan ini disusun dengan mempertimbangkan tingkat kemendesakan permasalahan pembangunan daerah dan fokus atau penekanan yang berbeda tiap tahunnya, namun tetap sinergi dan berkesinambungan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2016

Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemantapan Infrastruktur

- a. Ekonomi Berbasis Pertanian dan Industri, Perikanan dan Kelautan, Iklim Usaha dan Pariwisata;
- b. Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran, serta Permasalahan Sosial Lainnya;
- c. Infrastruktur, Perumahan Rakyat, Tata Ruang dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Penanggulangan Bencana;
- d. Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga;
- e. Kesehatan;
- f. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan;
- g. Lingkungan Hidup; dan
- h. Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, KB dan Ketahanan Keluarga.

2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2017

Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pertanian Untuk Kesejahteraan Masyarakat

- a. Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga;
- b. Penanganan Permasalahan Sosial dan Peningkatan Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan;
- c. Peningkatan Perekonomian Berbasis Pertanian dan Industri, Perikanan dan Kelautan, Peningkatan Investasi serta Pariwisata disertai dengan Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Wilayah yang Semakin Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan;
- d. Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesempatan Kerja; dan
- e. Penguatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.

3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2018

Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pertanian untuk Kesejahteraan Masyarakat

- a. Peningkatan perekonomian berbasis pertanian dan pariwisata;
- b. Penanggulangan kemiskinan berbasis potensi unggulan wilayah;

- c. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan;
 - d. Peningkatan kehidupan sosial dan keagamaan; dan
 - e. Peningkatan penerapan *good and clear government*.
4. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2019
Penguatan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Masyarakat
- a. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung pembangunan pertanian dan pariwisata;
 - b. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan;
 - c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat;
 - d. Peningkatan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas; dan
 - e. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kondusivitas wilayah.
5. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2020
Pemantapan Perekonomian Daerah Menuju Agrobisnis bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan
- a. Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata;
 - b. Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan;
 - c. Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat;
 - d. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas; dan
 - e. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
6. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021
Pengembangan Perekonomian Daerah Menuju Agrobisnis bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan
- a. Pengembangan perekonomian daerah berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah berbasis pertanian dan pariwisata;
 - b. Percepatan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan;
 - c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat;
 - d. Peningkatan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan; dan
 - e. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dan penciptaan kondusivitas wilayah.

BAB II PENYESUAIAN TERHADAP KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Melalui kebijakan umum diperoleh cerita strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya.

Kriteria suatu rumusan kebijakan umum antara lain:

1. menjelaskan strategi lebih spesifik, konkrit, operasional dan fokus;
2. mengarahkan pemilihan program yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan
3. mengarahkan pemilihan program agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.

Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas yang inherent. Agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat, kebijakan umum dibuat dalam empat perspektif sesuai strateginya, sebagai berikut:

1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan.
2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.
3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan sumber daya manusia, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah.
4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi

belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

A. Kebijakan Umum Pembangunan Tahun 2016-2021

Arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan dan program sesuai dengan fungsi dan tugas pokok masing-masing. Arah kebijakan umum ini merupakan penjabaran lebih detail dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, di antaranya sebagai berikut:

1. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang semakin unggul dan berkarakter, berlandaskan pada pengamalan dan penghayatan nilai-nilai luhur agama dan budaya, serta ditopang dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan yang makin baik;
2. membangun perekonomian daerah berbasis kepada ekonomi kerakyatan, optimalisasi pemanfaatan potensi sektor unggulan daerah dengan fokus pada agrobisnis (pertanian, perkebunan dan peternakan), pariwisata, jasa perdagangan dan kelautan yang berdaya saing, ditopang dengan penyediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas;
3. mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin melalui penciptaan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa, agama dan budaya; dan
4. meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik melalui profesionalisme, peningkatan tatakelola dan perluasan partisipasi publik melalui kebijakan penyelenggaraan *good governance* yang bermutu, akuntabel, toleran dan berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi.

B. Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, selain membutuhkan tingkat investasi yang tinggi, juga harus memperhatikan konsep perencanaan pembangunan wilayah di suatu daerah. Konsep perencanaan pembangunan wilayah ini harus memperhatikan potensi dan permasalahan yang ada. Optimalisasi potensi-potensi ekonomi unggulan daerah seperti pertanian, pariwisata, industri kecil menengah, dan sektor-sektor lainnya harus di-*overlay*-kan atau disinkronkan dengan wilayah dimana potensi-potensi unggulan tersebut berada, karena tidak semua wilayah mempunyai potensi unggulan yang sama, tetapi setiap wilayah pasti memiliki satu potensi ekonomi unggulan yang harus dikembangkan. Keterpaduan

potensi ekonomi unggulan daerah dan aspek penataan ruang diperlukan agar seluruh wilayah dalam suatu daerah dapat berkembang bersama-sama. Wilayah dengan potensi ekonomi unggulan yang besar dapat dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan yang akan menarik dan mendukung wilayah-wilayah di sekitarnya dengan potensi ekonomi unggulan yang lebih kecil.

Secara kewilayahan berdasar dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031, pembangunan daerah diprioritaskan pada kawasan strategis kabupaten dan/atau kawasan yang mendukung kawasan strategis provinsi dan/atau nasional.

1. Kawasan Strategis Nasional

Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan Strategis Nasional di wilayah Kabupaten Kebumen meliputi:

- a. Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertahanan keamanan. Kawasan ini meliputi:
 - 1) Markas Komando Distrik Militer 0709 Kebumen;
 - 2) Komando Rayon Militer;
 - 3) Polisi Resor;
 - 4) Polisi Sektor;
 - 5) Sekolah Calon Tamtama;
 - 6) Detasemen Kesehatan TNI;
 - 7) Daerah latihan TNI;
 - 8) Daerah latihan dan uji coba TNI;
 - 9) Lapangan uji coba senjata; dan
 - 10) Pos TNI Angkatan Laut.
- b. Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan ini meliputi:
 - 1) Kawasan Geologi Karangsembung; dan
 - 2) Kawasan DAS Serayu-Bogowonto.
- c. Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Kawasan ini meliputi Jaringan Jalan Lintas Selatan sebagai Jalan Strategis Nasional.

2. Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Kawasan Strategis Provinsi di wilayah Kabupaten Kebumen meliputi:

- a. Kawasan Perkotaan Gombong-Karanganyar-Kebumen dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. Kawasan Bentang Alam Karst dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan

- c. Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.
3. Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan Strategis Kabupaten, meliputi:

 - a. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Kawasan ini meliputi:
 - 1) Kawasan ekonomi cepat tumbuh Prembun-Kutowinangun-Kebumen-Sruweng-Karanganyar-Gombong;
 - 2) Kawasan pesisir Ayah;
 - 3) Kawasan Petanahan;
 - 4) Kawasan Strategis Lahan Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Puring, Buayan, Sadang, Ayah, Karangsambung, Prembun, Padureso, Petanahan, Rowokele, Sempor, dan Karanggayam;
 - 5) Kawasan perbatasan Rowokele dan Mirit;
 - 6) Kawasan industri genteng Pejagoan; dan
 - 7) Kawasan pelestarian sarang burung walet di Kecamatan Ayah dan Buayan.
 - b. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya. Kawasan ini meliputi:
 - 1) Benteng Van Der Wijck di Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong;
 - 2) Benteng Jepang di Desa Argopeni Kecamatan Ayah;
 - 3) Masjid Soko Tunggal di Desa Sedayu Kecamatan Sempor; dan
 - 4) Candi Lingga dan Yoni di Desa Sumberadi Kecamatan Kebumen.
 - c. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan ini meliputi:
 - 1) Hutan bakau di sekitar muara Sungai Ijo dan muara Sungai Telomoyo; dan
 - 2) Kawasan hutan lindung di sekitar Waduk Sempor dan Waduk Wadaslintang.
 - d. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi, meliputi:
 - 1) Kawasan Waduk Sempor; dan
 - 2) Kawasan Waduk Wadaslintang.

Berdasarkan hasil pembobotan indikator ekonomi, sosial budaya dan lingkungan, terhadap kawasan-kawasan strategis yang mendukung visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016-2021, didapatkan 5 kawasan strategis dengan bobot nilai tertinggi, antara lain:

1. Jaringan Jalan Selatan-Selatan;
2. Kawasan Pesisir Ayah;
3. Kawasan Ekonomi cepat tumbuh Prembun-Kutowinangun-Kebumen-Sruweng-Karanganyar-Gombong;
4. Kawasan Strategis Lahan Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Puring, Buayan, Sadang, Ayah, Karangsembung, Prembun, Padureso, Petanahan, Rowokele, Sempor, dan Karanggayam; dan
5. Kawasan Hutan bakau di sekitar muara Sungai Ijo dan muara Sungai Telomoyo.

C. Kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat strategis bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Peluang untuk mewujudkan desa yang sejahtera semakin terbuka, karena desa memiliki kewenangan yang jelas dan alokasi dana yang pasti, demi mewujudkan desa yang makmur. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya akan mendorong dan memperkuat pembangunan desa yang dijalankan sesuai dengan prinsip pemberdayaan dan partisipasi masyarakat serta didasarkan atas kelembagaan tata kelola desa yang transparan dan akuntabel.

Setidaknya, ada lima isu strategis dalam konstruksi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu pembangunan desa; keuangan, aset dan Badan Usaha Milik Desa; pembangunan kawasan perdesaan; kerjasama antardesa; serta lembaga kemasyarakatan desa. Dari kelima isu tersebut, isu pembangunan kawasan perdesaan mempunyai pengaruh terhadap perubahan kerangka kebijakan pembangunan desa, sekaligus akan mendorong dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka otoritas dan peran desa menjadi jelas, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan desanya sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, upaya pembangunan kawasan perdesaan menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten dan kota, termasuk Kabupaten Kebumen.

Berkenaan dengan dasar hukum tentang pengertian suatu kawasan, terdapat dua peraturan setingkat undang-undang yang memberikan penjelasan tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pengertian kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. Pengelolaan kawasan didasarkan pada dua karakter kegiatan yang spesifik, yaitu perkotaan dan perdesaan. Terdapat satu istilah lain, yaitu tentang kawasan khusus, yang merupakan bagian wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh pemerintah untuk

menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional.

Khusus untuk kawasan perdesaan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi, yang pengembangannya diarahkan untuk:

1. pemberdayaan masyarakat perdesaan;
2. pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya;
3. konservasi sumber daya alam;
4. pelestarian warisan budaya lokal;
5. pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan
6. penjagaan keseimbangan pembangunan.

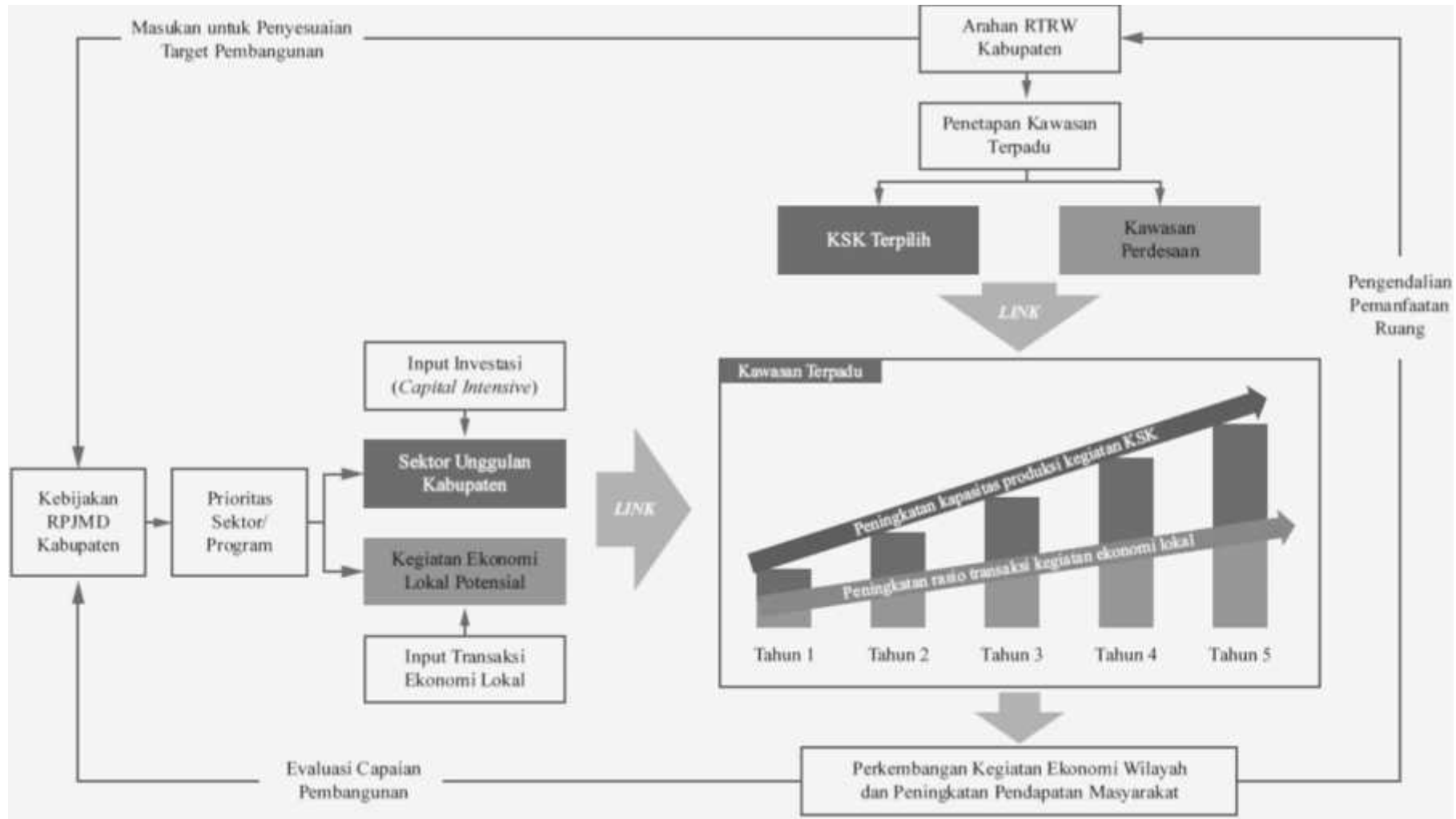
Pengertian kawasan perdesaan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan pernyataan yang sama, hanya orientasi pengembangannya memiliki perhatian berbeda, yaitu:

1. penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota;
2. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
3. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
4. pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Dari uraian di atas, maka kedua undang-undang mempunyai kesamaan tujuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat desa. Perbedaannya terletak kepada pendekatan pembangunan kawasan yang diterapkan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang lebih menekankan kepada aspek pelestarian lingkungan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat di perdesaan, sedangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lebih mengarahkan pendekatan pembangunannya kepada aspek sosial ekonomi masyarakat perdesaan. Hubungan antara Kawasan Strategis Kabupaten yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan eksistensi Kawasan Perdesaan yang ditetapkan oleh Bupati menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terletak pada sisi keduanya secara

bersamaan dapat memberikan dan menguatkan interaksi antara perencanaan ruang dengan pembangunan sektoral. Gambar 7.1 menjelaskan secara ilustratif bagaimana kedua undang-undang saling berhubungan dalam penerapannya. Diawali dengan dua dokumen utama sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah, yaitu dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah yang berfungsi sebagai pengendalian pemanfaatan ruang dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten yang berfungsi sebagai strategi pencapaian target pembangunan daerah.

Kedua tipe pengembangan kawasan ini akan bekerja dalam suatu ruang kabupaten secara terpadu dengan menciptakan dua interaksi (*link*), yang berbasis ruang dan sektor. Secara keruangan, Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dan kawasan perdesaan akan saling mengisi dan karena keduanya tidak dalam satu lokasi yang berimpit, maka pengembangan kawasan perdesaan harus mendukung/sejalan dengan kebijakan perencanaan dan pemanfaatan ruang dalam KSK. Di sisi lain, secara sektoral, KSK harus dapat memberikan akses dukungan kebijakan pengembangan sektor komoditas dan kegiatan ekonomi lokal dalam setiap kawasan perdesaan yang ada. Kedua bentuk interaksi ini akan berjalan selama lima tahun dalam periode pembangunan jangka menengah daerah, dengan target tahunan yang telah ditetapkan. Setiap peningkatan investasi produksi di dalam KSK, harus dapat memberikan dampak peningkatan transaksi kegiatan di dalam kawasan perdesaan. Kebijakan pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Kebumen selama 5 (lima) tahun ke depan harus memperhatikan hal-hal di atas.



Gambar 7.1
Skema Pengembangan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Sumber : Bappenas, 2015

D. Kebijakan Umum Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Upaya penanggulangan kemiskinan dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah disusun dengan prinsip yang mengacu pada nilai dasar yang berkaitan dengan tujuan kesamaan hak, tanpa perbedaan dan manfaat bersama, serta nilai-nilai yang berkaitan dengan proses meliputi partisipasi, transparansi, akuntabilitas, keterwakilan, keberlanjutan, kemitraan dan keterpaduan.

Kebijakan umum untuk program penanggulangan kemiskinan pada hakekatnya merupakan kebijakan publik yang berpihak pada orang miskin. Oleh karena itu, kebijakan tersebut harus diterjemahkan dalam pembangunan yang berpihak pada kaum miskin dan pertumbuhan ekonomi yang berpihak pada kaum miskin.

Berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman, serta kerangka berpikir yang melatarbelakangi upaya percepatan penanggulangan kemiskinan melalui kesepakatan segenap pihak yang berkepentingan telah dirumuskan 4 (empat) kebijakan utama dalam menyusun program penanggulangan kemiskinan, yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha

Strategi yang dilakukan untuk menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.

2. Kebijakan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat

Strategi yang dilakukan untuk memperkuat kelembagaan sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat, dan memperluas partisipasi masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar. Kebijakan yang dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat.

3. Kebijakan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Strategi yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan agar dapat memanfaatkan perkembangan lingkungan.

4. Kebijakan Perlindungan Sosial dan Lingkungan

Strategi yang dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi kelompok rentan (perempuan kepala rumah tangga, fakir miskin, orang jompo, anak terlantar, kemampuan berbeda/penyandang cacat) dan masyarakat miskin baru laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial.

Penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial, singkat dan sekaligus karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin dan keterbatasan sumberdaya untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar. Oleh sebab itu, rencana aksi penanggulangan kemiskinan dipusatkan pada prioritas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, lingkungan hidup dan sumberdaya alam serta rasa aman dan diakui/partisipasi, dengan memperhitungkan kemajuan secara bertahap.

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, upaya-upaya terobosan yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun mendatang, antara lain:

1. Penyusunan Satu Data Kemiskinan Kabupaten Kebumen melalui kegiatan pendataan dan verifikasi lapangan terhadap data kemiskinan, dengan indikator yang mengkombinasikan indikator kemiskinan Nasional dan indikator kearifan lokal. Pendataan dan verifikasi dilakukan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa, Kelurahan dan Kecamatan, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani perencanaan, penelitian dan pengembangan dan Unit Pelayanan Terpadu Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, bersama Perangkat Daerah terkait.
2. Menyusun model penanggulangan kemiskinan terpadu berbasis kawasan pada daerah-daerah/wilayah-wilayah tertentu yang menjadi kantong kemiskinan dan memiliki karakteristik seperti:
 - a. kawasan pertanian dan perkebunan (model pengembangan desa-desa miskin di kawasan utara seperti Kecamatan Karanggayam, Karangsembung, Sadang dan Alian);
 - b. kawasan pariwisata (model pengembangan desa-desa di Kawasan Pesisir Ayah);
 - c. kawasan pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan (model pengembangan desa-desa di Kawasan Pesisir Puring, Petanahan, Klirong, Buluspesantren, Ambal dan Mirit); dan
 - d. kawasan industri kecil (model pengembangan desa-desa di wilayah tengah Kabupaten Kebumen).
3. Menjadikan program percepatan penanggulangan kemiskinan sebagai suatu Gerakan Daerah dan Gerakan Bersama yang dibangun dengan komitmen bersama para pemangku kepentingan sebagai pilar-pilar utama pembangunan serta dilaksanakan melalui fondasi nilai-nilai agama dan budaya masyarakat.
4. Penyusunan Masterplan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kebumen (MP3KG) beserta *roadmap* dan Rencana Aksinya.

5. Optimalisasi dan dinamisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah melalui:
 - a. rapat koordinasi yang terjadwal (minimal dilakukan setiap triwulan);
 - b. menggunakan sistim Ban Berjalan, melalui instrumen-instrumen monitoring dan evaluasi; dan
 - c. penyediaan anggaran yang memadai.

Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dalam lima tahun mendatang memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat yang mempunyai otoritas dan bertanggung jawab atas terwujudnya rencana aksi penanggulangan kemiskinan yang mencakup wewenang dalam melakukan koordinasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan, penyusunan anggaran, monitoring dan evaluasi. Selain itu, perlu didukung oleh kemitraan dan kerjasama berbagai pelaku dan peran dan keterpaduan langkah dari berbagai pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Kebumen, lembaga perwakilan, pelaku usaha, organisasi masyarakat, organisasi profesi, maupun unsur perguruan tinggi.

Secara operasional, kebijakan dan program percepatan penanggulangan kemiskinan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 7.1
Strategi/Kebijakan dan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

STRATEGI/KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
<p>Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha</p> <p>Menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan</p>	<p>Program-Program yang mendukung strategi/kebijakan ini di antaranya:</p>	
	<p>Program Peningkatan Kesempatan kerja;</p>	<p>Perangkat Daerah yang menangani Urusan Tenaga Kerja</p>
	<p>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</p>	<p>Perangkat Daerah yang menangani Urusan Tenaga Kerja</p>
	<p>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</p>	<p>Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perdagangan</p>
	<p>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</p>	<p>Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perdagangan</p>
	<p>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</p>	<p>Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pangan</p>
	<p>Program Pengembangan Perikanan Tangkap</p>	<p>Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kelautan dan Perikanan</p>
	<p>Program Pengembangan Budidaya Perikanan</p>	<p>Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kelautan dan Perikanan</p>
	<p>Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan</p>	<p>Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kelautan dan Perikanan</p>
	<p>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,</p>	<p>Perangkat Daerah yang</p>

STRATEGI/KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
	Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	menangani Urusan Pertanian
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pertanian
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pariwisata
	Program Pengembangan Destinasi Wisata	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pariwisata
	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Koperasi KUKM
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Koperasi KUKM
	Program pengembangan sistim pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Koperasi KUKM
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Penanaman Modal
	Program Pembinaan dan Pengembangan bidang Ketenagalistrikan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Energi SDM
	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan

STRATEGI/KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		Umum dan Penataan Ruang
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perhubungan
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perhubungan
	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perhubungan
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Komunikasi dan Informatika
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Perangkat Daerah yang menangani Urusan

STRATEGI/KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Daerah/Pemerintah Desa	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Memperkuat kelembagaan sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat, dan memperluas partisipasi masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar	Program-Program yang mendukung strategi/kebijakan ini di antaranya:	
	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kelautan dan Perikanan
	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kelautan dan Perikanan
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pertanian
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pertanian

STRATEGI/KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pertanian
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Sosial
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Koperasi UKM
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

STRATEGI/KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perencanaan Pembangunan
	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Desa Adat Yang Bersumber Dari APBN	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan agar dapat memanfaatkan perkembangan lingkungan	Program-Program yang mendukung strategi/ kebijakan ini di antaranya:	
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pendidikan
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pendidikan
	Program Pendidikan Menengah	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pendidikan
	Program Pendidikan Non Formal	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pendidikan

STRATEGI/KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pendidikan
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan
	Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan
	Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan

STRATEGI/KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan
	Program Badan Layanan Umum Daerah	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan
	Program Keluarga Berencana	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perpustakaan
<p>Perlindungan Sosial dan Lingkungan Memberikan perlindungan dan rasa aman bagi kelompok rentan (perempuan kepala rumah tangga, fakir miskin, orang jompo, anak terlantar, kemampuan berbeda/penyandang cacat) dan masyarakat miskin baru laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial</p>	<p>Program-Program yang mendukung strategi/ kebijakan ini di antaranya:</p> <p>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya</p> <p>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</p> <p>Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma</p> <p>Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo</p> <p>Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)</p>	<p>Perangkat Daerah yang menangani Urusan Sosial</p> <p>Perangkat Daerah yang menangani Urusan Sosial</p> <p>Perangkat Daerah yang menangani Urusan Sosial</p> <p>Perangkat Daerah yang menangani Urusan Sosial</p> <p>Perangkat Daerah yang menangani Urusan Sosial</p>

STRATEGI/KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan konservasi sungai, Danau dan sumber Daya Air lainnya	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengendalian Banjir	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengembangan Perumahan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Sosial
	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Sosial
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Sosial
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Sosial
	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Sosial

STRATEGI/KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan
	Belanja Bantuan Sosial Pendidikan	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pendidikan
	Belanja Bantuan Sosial Kesehatan	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan
	Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Miskin	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Perangkat Daerah yang menangani Urusan Sosial
	Belanja Bantuan Sosial Kepada Korban Bencana Alam	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Perangkat Daerah yang menangani Urusan Sosial

Sumber : Data primer diolah

E. Kebijakan Umum Pengembangan Agrobisnis

Pengembangan agrobisnis yang berdaya saing di daerah berbasis pertanian seperti Kabupaten Kebumen, merupakan upaya pengembangan perekonomian daerah yang paling efektif. Hal ini didasarkan karena agrobisnis memiliki kandungan komponen lokal tinggi yang lebih potensial untuk dikembangkan.

Pengembangan agrobisnis bukan hanya diarahkan pada pengembangan pertanian primer atau subsistem *on-farm* agrobisnis saja, melainkan juga mencakup subsistem agrobisnis hulu (*up-stream*), yakni kelompok industri yang menghasilkan sarana produksi bagi pertanian primer, seperti industri perbenihan. Di sisi lain, kelompok industri tersebut masih kurang lengkap jika belum ada subsistem agrobisnis hilir (*down-stream*), yakni industri-industri yang mengolah hasil pertanian primer menjadi produk olahan beserta kegiatan perdagangannya.

Seringkali pengembangan agrobisnis di setiap daerah hanya sebatas pada pemanfaatan kelimpahan sumber daya yang ada atau mengandalkan keunggulan komparatif semata, seharusnya pengembangan agrobisnis juga dikembangkan dan ditransformasikan ke daerah lain serta memperoleh dukungan dari organisasi ekonomi yang dibentuk oleh rakyat. Selain dukungan infrastruktur, kebijakan makroekonomi sangat diperlukan untuk mengembangkan agrobisnis sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi daerah.

Untuk mencapai sasaran pengembangan agrobisnis, perlu disusun kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pengembangan agrobisnis, yang harus mencakup aspek sektoral dan spasial dalam hal ini bidang sosial ekonomi, lingkungan hidup, dan penataan ruang.

Kebijakan umum pengembangan agrobisnis di Kabupaten Kebumen diarahkan pada strategi sebagai berikut:

1. penentuan dan pengembangan sentra-sentra produksi pertanian dalam format korporasi (*corporate farming*) berbasis manajemen yang baik sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas usaha;
2. pola pembiayaan yang lebih berorientasi kepada pembiayaan output daripada pembiayaan proses. Pola ini akan mendorong pelaku usaha untuk lebih berkompetisi menunjukkan kinerja usahanya untuk meraih *reward* berupa penggantian sebagian biaya-biaya produksinya;
3. pemberdayaan kelompok usaha agribisnis yang mengintegrasikan usaha hulu dan hilir dalam satu kesatuan usaha sehingga peluang keuntungan kelompok lebih besar;
4. tata guna lahan dan air (pengolahan terhadap sumberdaya lahan dan air yang berkelanjutan);

5. pengaturan (*rute*) transportasi sebagai akses pendukung kawasan agrobisnis;
6. perlu adanya sistem tarif;
7. penelitian dan pengembangan (*Resource Development*);
8. perlu menarik investasi/investor besar;
9. insentif dan disinsentif kultural;
10. tidak boleh dikembangkannya industri yang bersifat polutif pada zona agrobisnis; dan
11. perlu adanya dukungan atas inisiatif/rintisan-rintisan ekonomi pertanian.

Secara spasial, berdasarkan kawasan strategis, peruntukan dan potensi wilayah, pengembangan agrobisnis di Kabupaten Kebumen selama 5 (lima) tahun ke depan, diarahkan antara lain pada wilayah:

1. Kawasan EMAS (Eko-Mina-Agro-wiSata), dengan cakupan wilayah meliputi Kecamatan Ayah, Puring, Buayan, Kuwarasan, Petanahan, Klirong, Buluspesantren, dan Ambal. Sektor-sektor yang dikembangkan di daerah ini antara lain pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan serta pariwisata;
2. Kawasan Agrowisata Tanaman Buah-Buahan, di wilayah Kecamatan Karangsembung dan Sadang; dan
3. Kawasan penunjang, yang terdiri atas:
 - a. kawasan pusat-pusat jasa di wilayah Kecamatan Kebumen, Karanganyar, Gombong, Prembun dan Kutowinangun;
 - b. kawasan industri di wilayah Kecamatan Petanahan dan Klirong; dan
 - c. pengembangan infrastruktur penunjang di antaranya jalan selatan-selatan di wilayah pesisir (Mirit-Ayah), jalan lintas utara di wilayah (Rowokele-Padureso) dan pembangunan embung-embung mini di kawasan pertanian (Karangsembung, Sadang, Karanggayam dan Ayah).

F. Program Pembangunan Daerah

Setelah kebijakan umum dibuat, langkah selanjutnya adalah merumuskan program pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkret dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang mendefinisikan tujuan startegis dalam 5 (lima) tahun.

Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Suatu program

pembangunan daerah dapat berupa pernyataan yang disamakan atau sekurang-kurangnya mengandung program kepala daerah terpilih yang didalamnya berisi program prioritas yang bersifat strategis.

Perumusan program pembangunan jangka menengah daerah termasuk program prioritas di dalamnya, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Program harus disusun dalam kerangka strategis pembangunan jangka menengah daerah, yaitu harus memperhitungkan bahwa program yang dirumuskan merupakan salah satu elemen dalam pencapaian rencana pembangunan jangka menengah daerah.
2. Untuk meningkatkan rasa tanggung jawab atas pencapaian kinerja program, dalam penyusunan program harus melibatkan Perangkat Daerah berkenaan.
3. Penamaan program dengan kalimat sederhana, ringkas, mudah dimengerti sehingga dapat dijabarkan ke dalam kegiatan.
4. Program harus didefinisikan sebagai cara untuk mencapai target kinerja sasaran melalui strategi dan arah kebijakan.

Rencana program pembangunan daerah tahun 2016-2021 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 5 (lima) fungsi penunjang urusan pemerintahan dan program pendukung operasional.

Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. Program Peningkatan Pendidikan Non Formal;
- c. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
- d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

2. Kesehatan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
- b. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
- c. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
- d. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
- e. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita;
- g. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;

- h. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
 - i. Program Pengawasan Obat dan Makanan;
 - j. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;
 - k. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
 - l. Program Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - m. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Pengairan Lainnya;
 - b. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - c. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - d. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - e. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan;
 - f. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan;
 - g. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan;
 - h. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
 - i. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;
 - j. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Cipta Karya;
 - k. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
 - l. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong;
 - m. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong;
 - n. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan;
 - o. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong;
 - p. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku;
 - q. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;
 - r. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - s. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam; dan
 - t. Program Pengendalian Banjir.
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a. Program Pengembangan Perumahan;
 - b. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran; dan

- c. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial.
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
 - a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
 - b. Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;
 - c. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan;
 - d. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat);
 - e. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
 - f. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
 - g. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan; dan
 - h. Program Pendidikan Politik Masyarakat.
6. Sosial
Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
 - a. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
 - b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
 - c. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
 - d. Program Pembinaan Para Penyandang Penyakit dan Trauma;
 - e. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo; dan
 - f. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya).

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja
Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
 - a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja; dan
 - c. Program Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
 - a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
 - b. Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan; dan

- c. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan.
3. Pangan
Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
4. Pertanahan
Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah.
5. Lingkungan Hidup
Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
 - a. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - b. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
 - c. Program Pengelolaan Areal Pemakaman;
 - d. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
 - e. Program Pengendalian Banjir;
 - f. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan;
 - g. Program Pengembangan Geologi dan Sumber Daya Mineral;
 - h. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
 - i. Program Peningkatan Pengendalian Polusi;
 - j. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam;
 - k. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; dan
 - l. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program yang akan dilaksanakan adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan.
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
 - a. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
 - b. Program Pengintensifan Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 - c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;
 - d. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
 - e. Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan;
 - f. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa; dan
 - g. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan.
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Keluarga Berencana;
- b. Program Pelayanan Kontrasepsi; dan
- c. Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga.

9. Perhubungan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
- b. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas;
- c. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor; dan
- d. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.

10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
- b. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa;
- c. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi;
- d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi; dan
- e. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.

11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
- b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
- c. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif;
- d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; dan
- e. Program Penataan Kelembagaan dan Peningkatan Kinerja BUMD.

12. Penanaman Modal

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga;
 - b. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga;
 - c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga; dan
 - d. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
14. Statistik
Program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.
15. Persandian
16. Kebudayaan
Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Keragaman Budaya.
17. Perpustakaan
Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.
18. Kearsipan
Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.

Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan
Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
 - a. Program Pengembangan Perikanan Tangkap;
 - b. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
 - c. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan;
 - d. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir; dan
 - e. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan.
2. Pariwisata
Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
 - a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
 - b. Program Pengembangan Kemitraan; dan
 - c. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
3. Pertanian
Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
 - a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
 - b. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;
 - c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
 - d. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan);

- e. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan;
 - f. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
 - g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak; dan
 - h. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan.
4. Kehutanan
Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan; dan
 - c. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.
5. Energi dan Sumberdaya Mineral
Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan.
6. Perdagangan
Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
 - b. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan; dan
 - c. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
7. Perindustrian
Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a. Program Penataan Struktur Industri;
 - b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi;
 - d. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; dan
 - e. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial.
8. Transmigrasi
Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan
Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a. Program Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar;

- e. Program Kerjasama Pembangunan;
 - f. Program Perencanaan Sosial Budaya;
 - g. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam;
 - h. Program Pengembangan Data/Informasi;
 - i. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; dan
 - j. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
2. Keuangan
- Rencana program yang akan dilaksanakan antara lain:
- a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - b. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.
3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
- Rencana program yang akan dilaksanakan antara lain:
- a. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
 - b. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
 - c. Program Pendidikan Kedinasan;
 - d. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; dan
 - e. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS.
4. Penelitian dan Pengembangan
5. Fungsi Lainnya
- Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan;
 - d. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - e. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;
 - f. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; dan
 - g. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah.

Selain program yang tercakup dalam klasifikasi urusan kewenangan Pemerintah Daerah di atas, dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah, direncanakan juga program yang bersifat pendukung operasional Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; dan
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja.

Rencana program pembangunan daerah tahun 2016-2021 merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Sesuai edaran Pemerintah Pusat yang menyatakan bahwa urusan dan kewenangan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mulai berlaku pada bulan Oktober 2016, maka rencana program prioritas daerah tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Bidang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, baik Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.

Tabel 7.2
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
Misi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia yang Memiliki Wawasan Luas, Tangguh serta Berkemajuan Melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas									
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Meningkatkan mutu pendidikan formal (terutama jenjang PAUD dan DIKDAS) dan pendidikan non formal	Peningkatan mutu pendidikan formal dan non formal	Angka Harapan Lama Sekolah	%	12,21	13,20	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pendidikan
			Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6,93	7,20	Program Pendidikan Non Formal	Pendidikan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pendidikan
	Meningkatkan akses dana bantuan pendidikan bagi masyarakat	Perluasan akses pendidikan formal					Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pendidikan
Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan	Mempermudah akses dalam memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam meraih pendidikan yang semakin berkualitas	Persentase Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan	%	53,30	63,39	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pendidikan
							Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pendidikan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pendidikan
							Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perpustakaan
							Belanja Bantuan Sosial Pendidikan-Bantuan Beasiswa bagi siswa kurang mampu S1	Belanja Tidak Langsung	PPKD
Meningkatnya prestasi olahraga dan pembinaan kepemudaan	Meningkatkan mutu/ kualitas prasarana olahraga dan pembinaan olahraga serta	Peningkatan kualitas dan kuantitas pembinaan olah raga dan	Capaian prestasi pemuda dan olahraga	%	37,78	65,38	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Kepemudaan dan Olahraga	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
	kepemudaan	praasarana olah raga.					Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Kepemudaan dan Olahraga	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kepemudaan dan Olahraga
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Kepemudaan dan Olahraga	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kepemudaan dan Olahraga
							Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Kepemudaan dan Olahraga	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat terutama untuk masyarakat kurang mampu dan berisiko tinggi terhadap kesehatan	Peningkatan akses kesehatan, serta kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,77	73,01	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Kesehatan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan
	Meningkatkan upaya penanggulangan penyakit						Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Kesehatan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan
	Meningkatkan kualitas SDM kesehatan						Program Upaya kesehatan masyarakat	Kesehatan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan
	Meningkatkan perilaku hidup sehat	Peningkatan perilaku hidup sehat masyarakat					Program Pengembangan Lingkungan sehat	Kesehatan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan
							Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
	Perluasan akses dan peningkatan pelayanan pada bayi pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar.	Meningkatkan akses dan pelayanan pada bayi pasca kelahiran pada kesehatan yang baik dan standar	Angka Kematian Bayi	Kasus	10,50	10,75	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Kesehatan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan
	Perluasan akses dan peningkatan pelayanan pada Ibu selama kehamilan dan pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar.	Meningkatkan akses dan pelayanan pada Ibu selama kehamilan dan pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar	Angka Kematian Ibu	Kasus	68,48	90,00	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan
Misi 2 : Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial Masyarakat dengan Melakukan Pemerataan dan Penyeimbangan Pembangunan secara Berkelanjutan untuk Mengurangi Kesenjangan Ekonomi, Sosial, Politik dan Budaya serta Melakukan Pembangunan yang Bukan Terfokus Hanya pada Aspek Fisik Saja tetapi juga Aspek Non Fisik berupa Pengembangan Potensi Intelektual, Rohaniah, Intuisi, Kata Hati, Akal Sehat, Fitrah dan yang Bersifat Batin Lainnya dalam Bingkai Kebersamaan dan Sinergitas Antar Elemen Masyarakat									
Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	Meningkatkan Koordinasi antar berbagai pihak untuk meminimalisir pelanggaran hukum, kasus bencana dan kemudahan bagi masyarakat untuk berdisiplin, berpolitik dan berbudaya	Optimalisasi produk hukum dan implementasinya di lapangan dalam mengatasi berbagai peristiwa/ kejadian di Kabupaten Kebumen	Penurunan Kasus Pelanggaran Hukum	Kasus	867,00	500,00	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
							Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
							Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
							Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
							Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
							Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
							Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
							Program kemitraan	Ketenteraman,	Perangkat Daerah yang menangani

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
							pengembangan wawasan kebangsaan	Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
							Program peningkatan peran serta kepemudaan	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
							Program pendidikan politik masyarakat	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	Meningkatkan pemahaman pengamalan agama	Penguatan implementasi kesalehan sosial dan kehidupan berbangsa dan bernegara berda-sarkan nilai-nilai ajaran agama	Angka Melek Huruf Siswa Lulus Sekolah	%	100,00	100,00	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
	Meningkatkan Pembinaan dan penanganan terhadap masyarakat yang rawan kasus asusila dan norma sosial keagamaan lainnya	Peningkatan peran pemerintah dalam kegiatan keagamaan dan toleransi beragama	Cakupan penanganan kasus-kasus pelanggaran norma keagamaan	%	23,66	37,65	Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Urusan Sosial	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Sosial
Misi 3 : Mengembangkan Kemandirian Perekonomian Daerah yang Bertumpu pada Pengembangan Potensi Lokal Unggulan Melalui Sinergi Fungsi-Fungsi Pertanian, Industri, Pariwisata dan Sektor Lainnya, dengan Penekanan pada Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Penciptaan Lapangan Kerja serta Berwawasan Lingkungan									
Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	Meningkatkan akses permodalan dan pemasaran hasil produksi industri kecil dan menengah	Peningkatan produktivitas dan efisiensi industri kecil dan menengah.	Pertumbuhan ekonomi	%	5,83	6,00	Program Pengembangan Industri kecil dan menengah	Penanaman Modal	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Penanaman Modal
	Penganekaragaman ketahanan pangan berbasis potensi lokal	Optimalisasi ketahanan pangan yang berbasis potensi lokal	Pendapatan perkapita	Ribu Rp	16.983,67	25.179,48	Program peningkatan ketahanan pangan	Pangan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pangan
	Meningkatkan hasil produksi sektor pertanian, peternakan, perikanan, kelautan dan perkebunan	Peningkatan produktivitas sektor pertanian, peternakan, perikanan, kelautan dan	Rasio Gini	Angka	0,24	0,21	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pertanian
			Terbangunnya Kawasan	Kawasan	-	6,00	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pertanian	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pertanian

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
		perkebunan	Pembangunan Ekonomi				Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Pertanian	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pertanian
							Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pertanian	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pertanian
							Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Pertanian	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pertanian
							Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Pertanian	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pertanian
							Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pertanian	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pertanian
							Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Pertanian	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pertanian
							Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Pertanian	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pertanian
							Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Kelautan dan Perikanan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kelautan dan Perikanan
							Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kelautan dan Perikanan
							Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kelautan dan Perikanan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
							Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Kelautan dan Perikanan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kelautan dan Perikanan
							Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Kelautan dan Perikanan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kelautan dan Perikanan
							Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Kehutanan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pertanian
							Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Kehutanan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pertanian
							Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Kehutanan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pertanian
	Memperluas akses permodalan dan pemasaran produk dan jasa koperasi	Peningkatan peran koperasi sebagai lembaga intermediasi keuangan untuk kesejahteraan anggota.					Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
							Program pengembangan sistim pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
							Program Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
	Meningkatkan kualitas SDM koperasi	Pembangunan wilayah berbasis kawasan dan potensi daerah					Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Mengembangkan kawasan perdesaan						Program Perencanaan Tata Ruang	Fungsi Penunjang Perencanaan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perencanaan
	Mengembangkan Kawasan Industri						Program Penataan Struktur Industri	Perindustrian	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perindustrian
	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan perdagangan dalam negeri dalam usaha meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha dan masyarakat yang terlibat	Peningkatan efisiensi kegiatan perdagangan dalam negeri.					Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam Negeri	Perindustrian	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perindustrian
							Program Pengembangan industri kecil dan menengah	Perindustrian	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perindustrian
							Program peningkatan kapasitas Iptek sistem Produksi	Perindustrian	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perindustrian
	Meningkatkan kualitas SDM industri kecil dan menengah	Pengendalian inflasi sehingga tercipta stabil-					Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Perindustrian	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perindustrian
							Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Perindustrian	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perindustrian
							Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Perdagangan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan
	Peningkatan operasi pasar								

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
		itas harga barang dan jasa yang tidak merugikan masyarakat							Perdagangan
							Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Perdagangan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perdagangan
Meningkatnya daya saing investasi daerah	Mengembangkan sistem informasi investasi daerah dan perizinan terpadu satu pintu	Peningkatan kemudahan iklim investasi di daerah.	Persentase peningkatan investasi PMA/PMDN	%	-	6,00	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Penanaman Modal
							Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Perdagangan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perdagangan
							Program Penataan kelembagaan dan peningkatan kinerja BUMD	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Meningkatnya kunjungan wisatawan	Meningkatkan upaya penggalian dan promosi/pemasaran obyek-obyek wisata	Pengembangan pariwisata berbasis potensi alam dan non alam, dan berbasis komunitas/masyarakat	Prosentase peningkatan kunjungan wisata	%	16,73	19,69	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Pariwisata	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pariwisata
							Program pengembangan Kemitraan	Pariwisata	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pariwisata
							Program Pengembangan Destinasi Wisata	Pariwisata	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pariwisata
							Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kebudayaan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur wilayah	Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah	%	49,09	62,88	Program peningkatan jalan dan jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatkan kualitas jaringan irigasi						Program pembangunan jalan dan jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatkan kalitas pelayanan air minum dan sanitasi						Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatkan fasilitas dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (LLAJ)						Program Inspeksi Kondisi jalan dan jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatkan aksesibilitas komunikasi, informasi, dan media massa						Program tanggap darurat jalan dan jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana bidang keciptakarya						Program pembangunan sistem informasi/ data base jalan dan jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatkan pelayanan air bersih dan pengelolaan air limbah serta pengelolaan dan konservasi SDA								

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
	Meningkatkan ketertiban administrasi pertanahan secara elektronik						Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatkan jaringan listrik perdesaan						Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Program Peningkatan Sarana/Prasarana Cipta Karya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Program Pengembangan, Pengelolaan dan konservasi sungai, Danau dan sumber Daya Air lainnya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
							Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Program pembangunan saluran drainase /gorong gorong	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Program penyediaan dan pengolahan air baku	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Perhubungan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perhubungan
							Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Perhubungan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perhubungan
							Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Perhubungan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perhubungan
							Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Perhubungan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
									Perhubungan
							Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Komunikasi dan Informatika	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Komunikasi dan Informatika
							Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Komunikasi dan Informatika	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Komunikasi dan Informatika
							Program pengkajiandan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Komunikasi dan Informatika	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Komunikasi dan Informatika
							Program kerjasama informasi dengan media massa	Komunikasi dan Informatika	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	Menurunkan tingkat perusakan lingkungan hidup termasuk pencemaran udara, air, dan tanah	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	75,00	75,00	Program pengendalian pemanfaatan ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Program Perencanaan Tata Ruang	Fungsi Perencanaan	Perangkat Daerah yang menangani Fungsi Perencanaan
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	59,92	77,50	Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Lingkungan Hidup
							Program Lingkungan Sehat Perumahan	Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Lingkungan Hidup

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
							Program pengelolaan areal pemakaman	Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Lingkungan Hidup
							Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Lingkungan Hidup
							Program Pengendalian Banjir	Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Lingkungan Hidup
							Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Lingkungan Hidup
							Program Pengembangan Geologi dan Sumber Daya Mineral	Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Lingkungan Hidup
							Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Lingkungan Hidup
							Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Lingkungan Hidup
							Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Lingkungan Hidup
							Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Lingkungan Hidup

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
							Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Lingkungan Hidup
							Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Program Pengendalian Banjir	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
							Program Pelayanan dan Rehabilitasi Masalah Sosial	Sosial	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Sosial
							Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
							Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Misi 4 : Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Memiliki Daya Saing Tinggi Berbasis Pertanian, Industri, Perikanan, Pariwisata dan Budaya melalui Proses Pembangunan Ekonomi yang Berkesinambungan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan dan Mengurangi Kemiskinan									
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan	Penurunan penduduk miskin di Kabupaten Kebumen	Angka Kemiskinan	%	20,02	15,45	Program pengembangan perumahan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
							Program Pengembangan Perumahan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
							Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	Sosial	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Sosial
							Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Sosial
							Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Sosial	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Sosial

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
							Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Sosial	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Sosial
							Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Sosial	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Sosial
							Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Transmigrasi	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Transmigrasi
							Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Transmigrasi	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Transmigrasi
							Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Sosial
							Program Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan sosial	Sosial	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Sosial
							Program Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Program Pelayanan Kontrasepsi	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
							Program dan penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Koperasi dan UMKM	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
							Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
							Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
							Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
							Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
							Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Meningkatnya keterserapan tenaga kerja	Meningkatkan keterampilan masyarakat	Peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat sesuai kebutuhan dunia kerja, khususnya dalam menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)	Angka Pengangguran	%	2,09	1,97	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Tenaga Kerja
	Meningkatkan penyediaan lapangan kerja serta jiwa kewirausahaan bagi masyarakat						Program Peningkatan Kesempatan kerja	Tenaga Kerja	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Tenaga Kerja
							Program Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Tenaga Kerja
Misi 5 : Menyediakan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang Baik, Meningkatkan Nilai Kualitas Pendidikan serta Membuka Akses Kesehatan yang Maksimal dan Terjangkau Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat									
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan ruang kelas	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan	Persentase Gedung Sekolah Dalam	%	76,64	88,37	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pendidikan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
pendidikan	Meningkatkan kualitas sarana pendukung pendidikan		Kondisi Baik				Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pendidikan
							Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pendidikan
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan PKD, puskesmas dan rumah sakit	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana bidang kesehatan	Persentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan	%	90,00	96,00	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kesehatan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan
							Program Pengawasan Obat dan Makanan	Kesehatan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan
							Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarna puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Kesehatan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan
							Program Standarisasi pelayanan kesehatan	Kesehatan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan
							Program BLUD	Kesehatan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan
							Program Badan Layanan Umum Daerah	Kesehatan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan
							Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit paru-paru/Rumah Sakit mata	Kesehatan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
Misi 6 : Memperkuat Sekaligus Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih serta Mampu Menciptakan Iklim Pelayanan Publik yang Maksimal (<i>Good and Clean Government</i>) dengan Jalan Menciptakan Kualitas Pelayanan Publik, Sistem Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Bersih, Efisien, Efektif, Profesional, Transparan dan Akuntabel, yang Didukung dengan Sistem Pengawasan yang Efektif Guna Menekan Perilaku Korupsi, Kolusi serta Meningkatkan Pengetahuan, Pemahaman dan Pendalaman Agama									
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, lembaga perwakilan daerah dan kualitas pelayanan administrasi Perkantoran serta kapasitas keuangan daerah	Optimalisasi kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah menuju terwujudnya Tata Pemerintahan yang Bersih dan Baik (<i>Good and Clean Governance</i>)	Prosentase capaian pelayanan SKPD	%	90,00	96,00	Program Peningkatan pelayanan administrasi kantor	Pendukung Operasional	Seluruh Perangkat Daerah
			Nilai akuntabilitas kinerja	angka	CC	B	Program Peningkatan sarana prasarana Aparatur;	Pendukung Operasional	Seluruh Perangkat Daerah
							Program pengembangan data/informasi	Fungsi Perencanaan	Seluruh Perangkat Daerah
							Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah	Statistik	Seluruh Perangkat Daerah
							Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Fungsi Lainnya	Perangkat Daerah yang menangani Urusan/Fungsi Lainnya
									Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan/Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
							Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Fungsi Lainnya	Perangkat Daerah yang menangani Urusan/Fungsi Lainnya
							Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan/Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
							Program Pendidikan Kedinasan	Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan/Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
							Program peningkatan disiplin aparatur	Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan/Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
							Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan/Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
							Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Fungsi Lainnya	Perangkat Daerah yang menangani Urusan/Fungsi Lainnya
							Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Komunikasi dan Informatika	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Komunikasi dan Informatika

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
							Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Kearsipan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kearsipan
							Program Penataan Administrasi kependudukan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							Program Penataan Administrasi Kependudukan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Fungsi Perencanaan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan/Fungsi Perencanaan
							Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Fungsi Perencanaan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan/Fungsi Perencanaan
							Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Fungsi Perencanaan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan/Fungsi Perencanaan
							Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Fungsi Perencanaan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan/Fungsi Perencanaan
							Program Kerjasama Pembangunan	Fungsi Perencanaan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan/Fungsi Perencanaan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
							Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Fungsi Perencanaan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan/Fungsi Perencanaan
							Program Perencanaan tata Ruang	Fungsi Perencanaan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan/Fungsi Perencanaan
							Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Fungsi Perencanaan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan/Fungsi Perencanaan
							Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	Fungsi Perencanaan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan/Fungsi Perencanaan
							Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan/Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
							Program Pengintensifan penanganan pengaduan masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							Program Pengembangan wilayah perbatasan;	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Perangkat Daerah yang menangani Urusan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
									Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Fungsi Lainnya	Perangkat Daerah yang menangani Urusan/Fungsi Lainnya
							Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan	Fungsi Lainnya	Perangkat Daerah yang menangani Urusan/Fungsi Lainnya
							Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;	Fungsi Lainnya	Perangkat Daerah yang menangani Urusan/Fungsi Lainnya
							Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Fungsi Lainnya	Perangkat Daerah yang menangani Urusan/Fungsi Lainnya
	Meningkatkan prosedur pelaporan sisten keuangan yang berbasis akrual dan sistem monitoring evaluasi (monev) hasil pembangunan yang semakin baik	Peningkatan akuntabilitas sistem pelaporan keuangan dan kinerja pembangunan menuju predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berkesinambungan	Opini BPK atas LKPD	Opini	WTP	WTP	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Fungsi Keuangan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan/Fungsi Keuangan
							Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Fungsi Keuangan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan/Fungsi Keuangan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
Meningkatnya penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kinerja aparatur dan lembaga daerah	Meningkatkan peran aparatur dan lembaga pemerintah dalam penerapan pengamalan nilai-nilai dan fasilitasi kegiatan keagamaan	Peningkatan peran aparatur dan lembaga daerah dalam penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan	Prosentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui kelembagaan BAZ	%	30,00	80,00	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Urusan Sosial	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Sosial

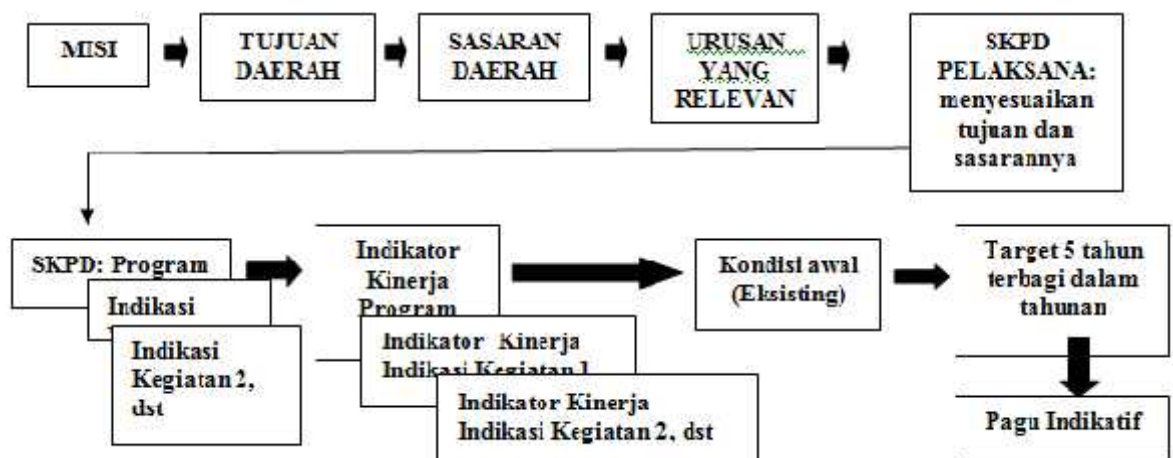
Sumber : Data primer diolah

BAB III PENYESUAIAN TERHADAP PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan visi dan misi kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcomes* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat dicapai. Hal ini akan dikaitkan dengan pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat dicapai.

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator kinerja daerah merupakan akumulasi atau penjumlahan capaian kinerja dari indikator kinerja program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Kemudian, indikator kinerja program setiap Perangkat Daerah merupakan akumulasi dari hasil satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (*output*) yang juga dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Penetapan indikator kinerja daerah dari masing-masing program yang dirancang oleh setiap Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

Keterkaitan pola pikir dari misi daerah hingga penjabaran indikator daerah, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 9.1
Alur Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Kebumen

Sumber : Hasil Analisis (2015)

Indikator kinerja daerah juga dapat memberikan gambaran tentang prestasi atau capaian pembangunan yang diharapkan pada masa yang akan datang. Untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja, setiap indikator dan target kinerja harus dinyatakan dengan angka (kuantitatif) yang jelas pada setiap tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan. Oleh karena itu, target kinerja harus dapat menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan juga memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond* dan *continously improve* (SMART-C). Ukuran keberhasilan pencapaian kinerja suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah. Hal ini diperlukan oleh masyarakat dalam rangka perwujudan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Indikator kinerja tersebut, antara lain berupa indikator kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, indeks pembangunan daerah, daya saing daerah dan daya tarik investasi. Secara komulatif hasil akhir tujuan otonomi daerah menggunakan ukuran peningkatan kualitas manusia yang digambarkan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Perumusan indikator kinerja utama Kepala Daerah menggambarkan tingkat keberhasilan kinerja daerah. Indikator ini dapat diukur dengan melihat indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal, Indikator Kinerja Kunci dan indikator kinerja lainnya yang digunakan Pemerintah. Indikator-indikator ini kemudian diintegrasikan dalam rumusan makro yang terukur dan kuantitatif untuk memudahkan pengendalian, evaluasi serta laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Rumusan indikator kinerja utama Kepala Daerah disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi daerah dan isu-isu strategis daerah sebagai faktor penentu keberhasilan kinerja daerah. Sedangkan rumusan indikator kinerja program Perangkat Daerah disesuaikan dengan arah kebijakan untuk mencapai indikator kinerja utama Bupati dan pelayanan yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah.

Penjabaran lebih rinci mengenai indikator kinerja utama daerah dan indikator kinerja utama Perangkat Daerah dalam Rencana RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, dapat dilihat selengkapnya dalam tabel-tabel berikut ini.

Tabel 9.1
Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Misi 1 : Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas										
1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1. Angka Harapan Lama Sekolah	12,21	12,38	12,54	12,71	12,87	13,04	13,20	13,20
		2. Rata-Rata Lama Sekolah	6,93	6,98	7,02	7,07	7,11	7,16	7,20	7,20
	Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan	3. Persentase Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan	53,30	54,74	56,49	58,04	59,55	61,47	63,39	63,39
	Meningkatnya prestasi dan pembinaan pemuda dan olahraga	4. Capaian prestasi pemuda dan olahraga	38,78	44,23	46,79	53,53	56,09	58,65	65,38	65,38
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5. Angka Harapan Hidup	72,77	72,81	72,85	72,89	72,93	72,97	73,01	73,01
		6. Angka Kematian Ibu	68,48	100	95	90	85	75	68	68
		7. Angka Kematian Bayi	10,50	11,00	11,00	10,90	10,90	10,75	10,50	10,50

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Misi 2 : Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat										
2. Menciptakan masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	8. Angka Melek Huruf Al Quran Siswa Lulus Sekolah	100	100	100	100	100	100	100	100
		9. Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan	23,66	25,04	27,56	30,09	32,61	35,13	37,65	37,65
3. Menciptakan masyarakat yang tenteram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	10. Kasus pelanggaran hukum	867	800	750	700	650	600	500	500

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<i>Misi 3</i> : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat										
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang merata berbasis ekonomi kerakyatan	Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	11. Pertumbuhan ekonomi (ADHK)	5,83	5,86	5,89	5,91	5,94	5,97	6,00	6,00
		12 Pendapatan perkapita penduduk (ADHK)	16.983,67	18.349,63	19.715,60	21.081,57	22.447,54	23.813,51	25.179,48	25.179,48
		13. Rasio/Indeks Gini	0,24	0,23	0,23	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21
		14. Terbangunnya kawasan pembangunan ekonomi	-	1	2	4	4	5	6	6
5. Meningkatkan Daya Saing Investasi dan Pariwisata Daerah	Meningkatnya daya saing investasi daerah	15. Persentase peningkatan investasi PMA/ PMDN	0	0	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	Meningkatnya kunjungan wisatawan	16. Persentase peningkatan kunjungan wisata	16,73	16,80	17,01	17,46	17,90	18,80	19,69	19,69
6. Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	17. Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah	49,09	52,68	54,83	57,00	59,43	61,88	62,88	62,88

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
7. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya pesisir berdasarkan azas konservasi, efisien dan lestari	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	59,92	63,00	66,00	69,00	74,75	76,00	77,50	77,50
<i>Misi 4</i> : Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan										
8. Mewujudkan masyarakat yang berdaya dan sejahtera	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	19. Angka Kemiskinan	20,02	19,26	18,50	17,74	16,98	16,22	15,45	15,45
9. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja dan penurunan angka pengangguran	Meningkatnya ketersediaan tenaga kerja	20. Angka Pengangguran	2,09	2,07	2,05	2,03	2,01	1,99	1,97	1,97

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Misi 5 : Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat										
10. Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	21. Persentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik	76,64	77,40	79,03	80,03	81,41	82,73	83,87	83,87
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan	22. Persentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan	90,00	94,00	94,50	95,00	95,50	96,00	96,00	96,00

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<p>Misi 6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama</p>										
11. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	23. Nilai Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	B	B	B	B	B	B	B	B
		24. Nilai akuntabilitas kinerja	CC	B	B	B	B	B	B	B
		25. Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kinerja aparatur dan lembaga daerah	26. Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00	80,00

Sumber : Data primer diolah

Tabel 9.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA						KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Misi 1 : Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas											
1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1. Angka Harapan Lama Sekolah	12,21	12,38	12,54	12,71	12,87	13,04	13,20	13,20	Perangkat Daerah Urusan Pendidikan
		2. Rata-Rata Lama Sekolah	6,93	6,98	7,02	7,07	7,11	7,16	7,20	7,20	Perangkat Daerah Urusan Pendidikan
		3. Angka Kelulusan	99,86	99,87	99,88	99,89	99,90	99,91	99,92	99,92	Perangkat Daerah Urusan Pendidikan
		4. Persentase penduduk yang berpendidikan tinggi (S1 ke atas)	1,82	1,88	1,95	2,01	2,08	2,14	2,20	2,20	Perangkat Daerah Urusan Pendidikan
		5. Indek Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pendidikan	B	B	B	B	B	B	B	B	Perangkat Daerah Urusan Pendidikan
	Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan	6. Angka Partisipasi Sekolah	89,06	90,26	91,26	91,86	92,36	92,86	93,36	93,36	Perangkat Daerah Urusan Pendidikan
		7. Persentase Sekolah Terakreditasi A	17,54	19,21	21,72	24,23	26,73	30,08	33,42	33,42	Perangkat Daerah Urusan Pendidikan
		8. Capaian kunjungan perpustakaan	9,06	10,05	11,25	12,70	14,47	16,63	19,27	19,27	Perangkat Daerah Urusan Perpustakaan
	Meningkatnya prestasi dan pembinaan olahraga	9. Capaian prestasi cabang olahraga	35,90	38,46	43,59	48,72	53,85	58,97	64,10	64,10	Perangkat Daerah Urusan Kepemudaan Dan Olahraga

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA						KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		10. Capaian keikutsertaan pemuda dalam skala regional dan nasional	41,67	50,00	50,00	58,33	58,33	58,33	66,67	66,67	Perangkat Daerah Urusan Kepemudaan Dan Olahraga
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	11. Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan	31,75	31,75	54,5	77,25	100	100	100	100	Perangkat Daerah Urusan Kesehatan
		12. Indek Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kesehatan	76/ B	78/ B	80/ B	81/ B	82/ A	83/ A	84/ A	84/ A	Perangkat Daerah Urusan Kesehatan
		13. Nilai kinerja kesehatan BLUD	A	A	A	A	A	A	A	A	Perangkat Daerah Urusan Kesehatan
		14. Cakupan penanganan ibu hamil resiko tinggi	100	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Urusan Kesehatan
		15. Persentase Kasus Gizi Buruk	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	Perangkat Daerah Urusan Kesehatan
<p>Misi 2 : Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat</p>											
2. Menciptakan masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	16. Angka Melek Huruf Al Quran Siswa Lulus Sekolah SD	100	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Urusan Pendidikan
		17. Angka Melek Huruf Al Quran Siswa Lulus Sekolah SMP	100	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Urusan Pendidikan
		18. Cakupan rehabilitasi kasus narkoba	2,67	5,13	7,69	10,26	12,82	15,38	17,95	17,95	Perangkat Daerah Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA						KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
											Masyarakat	
		19. Cakupan Penemuan Kasus Baru HIV	68,31	70	75	80	85	90	95	95	Perangkat Daerah Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	
		20. Cakupan Penanganan Kasus Pertikaian Antar Agama	100	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Fungsi Lainnya	
		21. Persentase masjid dan mushola dalam kondisi baik	79,98	65	70	75	80	85	90	90	Perangkat Daerah Fungsi Lainnya	
		22. Persentase Ponpes dan TPQ dalam kondisi baik	61,5	65	72,5	77,5	82,5	87,5	92,5	92,5	Perangkat Daerah Fungsi Lainnya	
		23. Persentase gereja dalam kondisi baik	80	85	90	95	100	100	100	100	Perangkat Daerah Fungsi Lainnya	
		24. Persentase wihara dalam kondisi baik	80	85	90	95	100	100	100	100	Perangkat Daerah Fungsi Lainnya	
3. Menciptakan masyarakat yang tenteram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	25. Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	867	750	600	560	485	400	300	300	Perangkat Daerah Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	
		26. Presentase cakupan penerbitan Akta Kelahiran	86,00	86,75	87,50	88,25	89,00	89,50	90,00	90,00	90,00	Perangkat Daerah Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		27. Prosentase cakupan penerbitan akta kematian	40,00	42,00	44,00	46,00	48,00	50,00	52,00	52,00	52,00	Perangkat Daerah Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA						KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		28. Persentase desa Siaga/ Tangguh Bencana	2,86	10,00	17,14	24,29	31,43	38,57	45,71	45,71	Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		29. Capaian peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat	41,00	52,80	64,60	76,40	80,00	85,00	90,00	90,00	Perangkat Daerah Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
		30. Capaian partisipasi masyarakat/penduduk dalam proses pemilihan umum	62,51	-	-	70,00	70,00	-	70,00	70,00	Perangkat Daerah Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
		31. Capaian peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan nilai budaya	42,86	62,22	62,50	64,00	67,27	69,23	70,00	70,00	Perangkat Daerah Urusan Kebudayaan

Misi 3 : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat

4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang merata berbasis ekonomi kerakyatan	Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	32. Produktivitas padi	6,53	6,54	6,55	6,55	6,56	6,56	6,57	6,57	Perangkat Daerah Urusan Pertanian	
		33. Produktivitas jagung	7,23	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	Perangkat Daerah Urusan Pertanian
		34. Produktivitas kedelai	1,18	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	Perangkat Daerah Urusan Pertanian
		35. Kenaikan Angka Nilai Tukar Petani (NTP)	102,00	102,20	102,40	102,60	102,80	103,00	103,20	103,20	103,20	Perangkat Daerah Urusan Pertanian
		36. Produksi kelapa	188.450,04	188.913,63	189.359,18	189.433,55	189.528,92	189.945,13	190.225,42	190.225,42	190.225,42	Perangkat Daerah Urusan Pertanian

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA						KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		37. Produksi tembakau	311,87	347,76	358,78	382,47	395,03	408,68	415,35	415,35	Perangkat Daerah Urusan Pertanian
		38. Produksi daging	11.101.920	11.102.031	11.102.140	11.102.250	11.102.360	11.102.470	11.102.580	11.102.580	Perangkat Daerah Urusan Pertanian
		39. Produksi Telur	3.836.272	3.836.310	3.836.350	3.836.390	3.836.430	3.836.470	3.836.510	3.836.510	Perangkat Daerah Urusan Pertanian
		40. Produksi ikan	9.627	10.092	10.582	11.099	11.644	12.220	12.826	12.826	Perangkat Daerah Urusan Kelautan Dan Perikanan
		41. Beroperasinya PPI yang bisa menampung kapal berbobot 30 GT ke atas	-	-	-	1	1	1	1	1	Perangkat Daerah Urusan Kelautan Dan Perikanan
		42. Produksi kayu bulat	17.149,26	17.320,75	17.493,95	17.668,89	17.845,57	18.024,03	18.204,27	18.204,27	Perangkat Daerah Urusan Pertanian
		43. Presentase Koperasi Aktif	78	80	82	85	88	90	92	92	Perangkat Daerah Urusan Koperasi Dan Ukm
		44. Peningkatan Jumlah UMKM	43.132	43.532	43.957	44.407	44.907	45.457	46.057	46.057	Perangkat Daerah Urusan Koperasi Dan Ukm
		45. Persentase penanganan kerawanan pangan	30,53	35,88	42,75	49,62	56,49	63,36	70,23	70,23	Perangkat Daerah Urusan Pangan
		46. Persentase kelompok/gapoktan yang tertangani stabilitas harga pangannya	10,65	20,43	30,22	40,00	49,78	59,57	69,35	69,35	Perangkat Daerah Urusan Pangan
		47. Persentase kelompok wanita yang melaksanakan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan	25,00	31,74	37,39	43,04	48,70	54,35	60,00	60,00	Perangkat Daerah Urusan Pangan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA						KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
		48. Persentase pasar tradisional dalam kondisi baik	31,11	40,00	48,89	60,00	71,11	77,78	100,00	100,00	Perangkat Daerah Urusan Perdagangan	
		49. Jumlah usaha perdagangan berizin	9.718	1.059	2.088	2.088	2.299	2.380	2.413	2.413	Perangkat Daerah Urusan Perdagangan	
		50. Jumlah industri kecil menengah	54.899	54.909	54.919	54.929	54.939	54.949	54.959	54.959	Perangkat Daerah Urusan Perdagangan	
		51. Terbangunnya kawasan industri	-	-	-	1	-	-	-	1	Perangkat Daerah Urusan Koperasi Dan Ukm	
		52. Terbentuknya Kawasan Perdesaan	-	1	1	1	1	1	1	6	Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
		53. Terbentuknya Unit Usaha Syariah pada BUMD	-	-	-	-	1	-	-	1	Perangkat Daerah Fungsi Lainnya	
5. Meningkatkan Daya Saing Investasi dan Pariwisata Daerah	Meningkatnya daya saing investasi daerah	54. Nilai investasi PMA/PMDN	324.436	324.436	324.436	340.658	361.097	382.763	405.729	405.729	Perangkat Daerah Urusan Penanaman Modal	
		55. Presentase BUMD dengan predikat sehat	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perangkat Daerah Fungsi Lainnya
		56. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perijinan Terpadu	80,75/ B	81,00/ B	81,50/ A	81,75/ A	82,00/ A	82,25/ A	82,50/ A	82,50/ A	82,50/ A	Perangkat Daerah Urusan Penanaman Modal
	Meningkatnya kunjungan wisatawan	57. Jumlah kunjungan wisatawan	1.117.136	1.304.815	1.526.764	1.793.337	2.114.344	2.511.841	3.006.422	3.006.422	Perangkat Daerah Urusan Pariwisata	
		58. Lama tinggal wisatawan	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,70	Perangkat Daerah Urusan Pariwisata	
6. Mewujudkan pelayanan infrastruktur	Meningkatnya pelayanan infrastruktur	59. Capaian jalan kabupaten dalam kondisi baik	45,92	48,74	51,55	54,37	57,18	60,00	60,00	45,92	Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Dan	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA						KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
wilayah yang mantap	yang mendukung pengembangan wilayah										Penataan Ruang
		60. Capaian jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	55,00	65,00	68,00	71,00	74,00	77,00	80,00	80,00	Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		61. Prosentase berkurangnya luasan kumuh perkotaan	-	16,67	33,33	50,00	66,67	83,33	100,00	100,00	Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		62. Cakupan pelayanan air bersih	11,45	13,00	13,78	14,62	15,54	16,53	16,53	16,53	Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		63. Cakupan lahan bersertifikat	20,53	21,53	22,53	23,53	24,53	25,53	26,53	26,53	Perangkat Daerah Urusan Pertanahan/Fungsi Lainnya
		64. Cakupan kualitas layanan transportasi	30,31	38,57	45,72	54,33	63,66	72,96	83,33	83,33	Perangkat Daerah Urusan Perhubungan
		65. Capaian layanan komunikasi	46,63	51,92	61,54	71,15	80,77	90,38	100,00	100,00	Perangkat Daerah Urusan Komunikasi Dan Informatika
		66. Rasio elektrifikasi	84,00	89,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	95,00	Perangkat Daerah Urusan Esdm
7. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya pesisir berdasarkan azas konservasi, efisien dan	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	67. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	56,54	57,00	57,50	58,00	58,50	59,00	60,00	60,00	Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		68. Penanganan lahan kritis	375,00	200,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	Perangkat Daerah Urusan Pertanian/ Kehutanan
		69. Capaian luas RTH Perkotaan	14,85	15,50	16,67	16,93	17,45	17,45	17,45	17,45	Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		70. Angka Indeks kualitas udara	73,17	75,00	76,00	77,00	77,50	78,00	79,00	79,00	Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA						KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
lestari		71. Angka Indeks kualitas air	46,67	51,00	56,00	61,00	72,00	74,00	76,00	76,00	Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup
		72. Cakupan pelayanan sampah	42,44	42,54	42,67	42,74	42,84	42,94	42,94	42,94	Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		73. Persentase usaha pertambangan yang menerapkan <i>good practice minning</i>	23,00	32,00	42,00	52,00	61,00	71,00	84,00	84,00	Perangkat Daerah Urusan Esdm

Misi 4 : Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan

8. Mewujudkan masyarakat yang berdaya dan sejahtera	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	74. Cakupan penanganan PMKS	14,82	16,08	16,11	16,13	16,16	16,18	16,20	16,20	Perangkat Daerah Urusan Sosial
		75. Cakupan rumah layak huni	91,25	92,86	95,26	97,66	100,00	100,00	100,00	100,00	Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		76. Cakupan Pembinaan Keluarga Sejahtera	31,96	32,01	32,13	32,15	32,24	32,31	32,37	32,37	Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		77. Cakupan Peserta KB Aktif	84,65	84,70	84,75	84,80	84,90	85,10	85,50	85,50	Perangkat Daerah Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA						KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
9. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja dan penurunan angka pengangguran	Meningkatnya keterserapan tenaga kerja	78. Capaian peningkatan keterserapan tenaga kerja	18,21	19,72	20,02	20,55	21,09	21,39	21,59	21,59	Perangkat Daerah Urusan Tenaga Kerja	
Misi 5 : Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat												
10. Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	79. Persentase Gedung PAUD/ sederajat dalam kondisi baik	70,54	71,48	76,17	79,92	83,68	87,43	90,24	90,24	Perangkat Daerah Urusan Pendidikan	
		80. Persentase Gedung SD/ sederajat dalam kondisi baik	66,22	67,01	67,51	66,22	66,22	66,22	66,22	66,22	66,22	Perangkat Daerah Urusan Pendidikan
		81. Persentase Gedung SMP/ sederajat dalam kondisi baik	82,22	82,89	83,56	84,46	85,58	86,48	87,60	87,60	87,60	Perangkat Daerah Urusan Pendidikan
	Meningkatnya sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan	82. Persentase Gedung SMA/ sederajat dalam kondisi baik	87,59	88,23	88,87	89,51	90,15	90,79	91,43	91,43	Perangkat Daerah Urusan Pendidikan	
		83. Tingkat ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasilitas pelayanan dasar kesehatan	80	87	87,5	88	88,5	90	90	90	90	Perangkat Daerah Urusan Kesehatan
		84. Tingkat pelayanan kegawatdaruratan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Urusan Kesehatan
		85. Tingkat mutu pelayanan sarana	90	95	96	97	98	98	98	98	98	Perangkat Daerah Urusan Kesehatan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA						KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		kesehatan									
		86. Nilai kinerja kesehatan BLUD	A	A	A	A	A	A	A	A	Perangkat Daerah Urusan Kesehatan
		87. Peningkatan Persentase Akses Sanitasi	65	65	70	75	80	80	85	85	Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
<p>Misi 6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (<i>Good and Clean Government</i>) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama</p>											
11. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	88. Capaian peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	86,17	88,13	89,59	92,48	92,98	94,80	96,52	96,52	Perangkat Daerah Fungsi Lainnya
		89. Capaian peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	15,00	25,00	35,00	45,00	55,00	65,00	70,00	70,00	Perangkat Daerah Fungsi Lainnya
		90. Capaian peningkatan pelayanan kecamatan	100	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Fungsi Lainnya
		91. Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	B	B	B	B	B	A	A	A	Perangkat Daerah Fungsi Lainnya
		92. Capaian peningkatan pelayanan kelurahan	100	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Fungsi Lainnya
		93. Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di Kelurahan	B	B	B	B	B	A	A	A	Perangkat Daerah Fungsi Lainnya

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA						KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		94. Capaian peningkatan pelayanan pemerintah desa	42,16	43,33	44,00	45,79	45,79	45,79	48,95	48,95	Perangkat Daerah Fungsi Lainnya
		95. Persentase jumlah Perangkat Daerah menerapkan arsip baku	4,60	16,09	22,61	29,31	36,02	42,72	49,43	49,43	Perangkat Daerah Fungsi Lainnya
		96. Capaian kinerja program	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	Perangkat Daerah Fungsi Lainnya
		97. Capaian akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan *)	54,28	58,65	63,27	67,88	72,50	74,90	79,52	79,52	Perangkat Daerah Fungsi Lainnya
		98. Persentase LAKIP yang nilainya meningkat	1,72	4,00	4,00	7,00	10,00	14,00	14,00	14,00	Perangkat Daerah Fungsi Lainnya
		99. Persentase Perangkat Daerah yang tidak ada temuan penyimpangan keuangan dalam audit LKPD oleh BPK	90,00	90,00	90,00	92,00	93,00	95,00	95,00	95,00	Perangkat Daerah Fungsi Lainnya
		100. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tepat waktu	90,00	90,00	90,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	Perangkat Daerah Fungsi Lainnya
		101. Nilai Leveling APIP Kabupaten	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Perangkat Daerah Fungsi Lainnya
		102. Capaian peningkatan pengelolaan keuangan	91,89	92,12	92,25	92,30	92,50	93,25	95,00	95,00	Perangkat Daerah Fungsi Lainnya

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA						KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		dan aset									
		103. Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00	80,00	Perangkat Daerah Fungsi Lainnya

Sumber : Data primer diolah

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD